DINAS KEHUTANAN
Sumatera Selatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

PALEMBANG, JANUARI 2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Nomor : 000.8.6.3/603/Dishut.I/2026
Tanggal : 30 Januari 2026

DINAS KEHUTANANPROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan ini mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 060/047/SE/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan LKjIP Tahun 2025 memuat rencana kegiatan, perjanjian kinerja dan capaian kinerja yang terdiri dari kerangka pengukuran kinerja, target dan realisasi indikator kinerja, perhitungan indikator kinerja dan evaluasi capaian indikator kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Palembang, Januari 2026

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M
Pembina Utama Madya,/ IVd
NIP. 19691208 199603 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun strategis bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat implementasi pengelolaan hutan secara lestari serta mendorong kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara nyata mendukung terwujudnya Visi "Sumsel Maju Terus untuk Semua", dan misi khususnya melalui pengelolaan hutan untuk mewujudkan kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Kinerja Dinas Kehutanan menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dengan mayoritas indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tujuan Pengelolaan Hutan Secara Lestari, capaian kinerja menunjukkan peningkatan signifikan. Produktivitas kawasan hutan tercermin dari realisasi Pembayaran PNBP sebesar Rp109,98 miliar atau 141,94% dari target, yang didorong oleh peningkatan aktivitas pemanfaatan hasil hutan dan kepatuhan pelaku usaha kehutanan. Upaya pengendalian kerusakan hutan juga berjalan sangat efektif, ditunjukkan oleh capaian patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove sebesar 427,87%, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang mencapai 236,61% dari target. Di sisi rehabilitasi, kegiatan penanaman pada lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai 5.124,40%, menunjukkan percepatan pemulihan lingkungan yang sangat signifikan.

Penguatan usaha ekonomi perhutanan sosial juga menunjukkan kinerja positif melalui pendampingan kelembagaan kelompok perhutanan sosial yang mencapai 119,43%. Sementara itu, tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada sektor kehutanan tetap terjaga dengan tingkat pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah sebesar 93,07%, yang dikategorikan sangat tinggi.

Pada tujuan Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan, indikatorstrategis seperti persentase tutupan lahan berhasil dipertahankan sesuai target, yaitu 18,8%. Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah menunjukkan tren sangat positif, ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,91% (364% dari target) serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 3,89% atau 238,65% dari target.

Dari aspek pemberdayaan masyarakat, kapasitas dan kemandirian Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) mengalami peningkatan signifikan, masing-masing mencapai 213,67% dan 154,33% dari target. Namun demikian, indikator peningkatan akses legal masyarakat melalui perhutanan sosial masih berada pada kategori sedang dengan capaian 75,09%, yang menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, Dinas Kehutanan berhasil menekan deforestasi hingga 0,214%, jauh lebih baik dari target, serta meningkatkan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Indeks Keanekaragaman Hayati, yang seluruhnya berada pada kategori sangat tinggi. Upaya rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan, dengan capaian rehabilitasi lahan kritis sebesar 353,85% dan peningkatan tutupan lahan sempadan sungai sebesar 152,38%.

Dari sisi tata kelola organisasi, kinerja perangkat daerah tetap terjaga dengan tingkat pemenuhan layanan kinerja sebesar 93,07% serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) yang mencapai 94,96%, mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat efektif, berkontribusi nyata terhadap pelestarian hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian ini menjadi fondasi yang kuat untuk penguatan kebijakan kehutanan yang berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya, dengan tetap memberi perhatian pada peningkatan akses legal perhutanan sosial dan penguatan tata kelola kelembagaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja 4
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 13
D. Landasan Hukum 15
E. Sistematika 16
F. Hasil Evaluasi SAKIP dan Rekomendasi 17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 18
A. Rencana Strategis 18
B. Rencana Kinerja 25
C. Perjanjian Kinerja 31
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 45
A. Capaian Kinerja Organisasi 34
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025 35
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 39
3. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra 44
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional 47
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan 50
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 57

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 62
8. Analisis Pengarusutamaan Gender 69
B. Realisasi Anggaran 78
C. Data Dukung Pencapaian Kinerja 80
D. Inovasi 122
E. Penghargaan 124
BAB IV. PENUTUP 125
A. Kesimpulan Umum 125
B. Langkah Strategis 126
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran Kawasan Hutan Menurut Fungsi Hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 5
Tabel 1.2 Status dan Kompetensi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 9
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 12
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 19
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 23
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Tahun 2025 25
Tabel 2.4 Rincian Belanja pada DPA APBD Tahun 2025 28
Tabel 2.5 Sumber Dana pada APBD Perubahan 2025 29
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Januari – September 31
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Oktober – Desember 32
Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja 35
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 37
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 41
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 45
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tingkat Nasional Tahun 2025 49
Tabel 3.6 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 52
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 59
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 64
Tabel 3.9 Pelembagaan dan Penyelenggaraan PUG 69
Tabel 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Tahun 2025 70
Tabel 3.11 Kegiatan Responsif Gender yang dilaksanakan oleh UPTD KPH . 72
Tabel 3.12 Kendala Kegiatan Tahun 2025 79

Tabel 3.13 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1 81
Tabel 3.14 Realisasi pembayaran PNBP Tahun 2025 82
Tabel 3.15 Realisasi pembayaran PNBP Perhutanan Sosial Tahun 2025..... 83
Tabel 3.16 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2 85
Tabel 3.17 Pelaksanaan patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan 86
Tabel 3.18 Realisasi kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengamanan hutan (Untuk pengisian Aplikasi Aksi pembangunan Rendah karbon Bapennas) 89
Tabel 3.19 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3 92
Tabel 3.20 Lahan Kritis dan Sangat Kritis Wilayah Sumatera Selatan 94
Tabel 3.21 Lahan Kritis Di Luar Kawasan Hutan Yang Direhabilitasi Provinsi Sumatera Selatan 96
Tabel 3.22 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 102
Tabel 3.23 Penanaman Didalam Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025..... 103
Tabel 3.24 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4 105
Tabel 3.25 Alokasi Pemberian Alat Ekonomi Produktif Tahun Anggaran 2025 110
Tabel 3.26 Persetujuan Perhutanan Sosial terbit Tahun 2025 111
Tabel 3.27 Kegiatan pendampingan Masyarakat bekerjasama dengan Mitra/NGO 113
Tabel 3.28 Rekapitulasi Persetujuan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 2025..... 115
Tabel 3.29 Hasil Penilaian Kelas Kelompok Perhutanan Sosial 116
Tabel 3.30 Kelas Kelompok Tani Hutan (Di Luar Kawasan Hutan) 116
Tabel 3.31 Jumlah dan sebaran penyuluh kehutanan dan kelompok masyarakat 118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan 5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 8
Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Gender 10
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 10
Gambar 2.1 Pohon Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 27
Gambar 2.2 Program dan Pagu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 30
Gambar 3.1 Partisipasi dalam Talkshow dengan tema Perempuan dan Generasi Muda Penjaga Hutan pada Seremonial kegiatan HMPI di Desa Batumarta X Pelatihan dan Pembuatan Pakan Ternak (Magot) .. 74
Gambar 3.2 Sosialisasi Pencegahan Karhutlah UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis 75
Gambar 3.3 Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) di UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji..... 75
Gambar 3.4 Kegiatan Pembelajaran Pertanian Cerdas Iklim dan contoh Kebun Belajar di UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis 75
Gambar 3.5 Kegiatan Patroli Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat UPTD KPH 76
Gambar 3.6 Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan di UPTD KPH Wilayah V Lempuing-Mesuji Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI 76
Gambar 3.7 Pendampingan dan pembentukan KUPS Perempuan dan Penjaga Hutan Wanita (*Woman Forest Defender*) di UPTD KPH Wilayah VIII Semendo 77
Gambar 3.8 Capaian PNBP Sektor Kehutanan Tahun 2025 81
Gambar 3.9 Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kawasan hutan pada PBPH 84
Gambar 3.10 Capaian Patroli Pengamanan Hutan dan Mangrove Tahun 2025 85

Gambar 3.11 Pengamanan Hutan dan Lahan 87
Gambar 3.12 Koordinasi dan Sosialisasi mitigasi konflik manusia dan satwa liar dengan Pemerintah Kabupaten, BKSDA Sumsel dan PBPH ..... .88
Gambar 3.13 Luas Cakupan Pencegahan Karhutlah Tahun 2025 89
Gambar 3.14 Patroli Kebakaran dan Pengamanan Hutan 91
Gambar 3.15 Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada PBPH dan PPKH 91
Gambar 3.16 Penanaman Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Tahun 2025 ..... .93
Gambar 3.17 Dokumen RTnRL dan Penyusunan Dokumen RTnRL Tahun 2025 95
Gambar 3.18 Kegiatan Penyediaan Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/ Tanaman Buah di UPTD KPH 99
Gambar 3.19 Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan 99
Gambar 3.20 Rehabilitasi Hutan Tahun 2025 100
Gambar 3.21 Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial Tahun 2025 106
Gambar 3.22 Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 107
Gambar 3.23 Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan dalam Pelatihan Arc GIS Tahun Anggaran 2025 107
Gambar 3.24 Pameran Sriwijaya Expo Tahun 2025 dan Pameran Festival Rempah Tahun Anggaran 2025 108
Gambar 3.25 Penyerahan Alat Ekonomi produktif 109
Gambar 3.26 Bimbingan Teknis Kelompok Tani Hutan 112
Gambar 3.27 Pendampingan Kelompok Tani Hutan 112
Gambar 3.28 Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 119
Gambar 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025 120
Gambar 3.30 Sertifikat Penghargaan dan Pemberian Penghargaa dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 124
Gambar 3.31 SK Penetapan KPH Efektif Tahun 2025 124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran II Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran III Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Lampiran IV Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Provinsi Sumatera Selatan 2025

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, yang secara rinci diatur dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra, yang menyajikan capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Renstra Dinas Kehutanan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah transisi untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Selanjutnya, Renstra ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 khususnya dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kehutanan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah: SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA. Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Khususnya di sektor kehutanan partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Terdapat 7 Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk implementasi visi Sumsel Maju Terus Untuk Semua. Sektor kehutanan mendukung 3 misi terkait dengan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya local, keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Isu strategis yang menjadi tantangan dalam kinerja Dinas Kehutanan dalam 5 tahun ke depan adalah penyelesaian permasalahan kawasan hutan baik penguasaan tanah maupun penyelesaian sawit keterlanjuran. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Pembangunan New Pelabuhan Tanjung Carat juga merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sumatera Selatan. Isu lainnya adalah perlunya evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terkait pembagian kewenangan urusan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mempercepat penyesuaian dengan kondisi riil di daerah, terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini selaras dengan isu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial.

Dinas Kehutanan juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan perlindungan kawasan sempadan sungai, yang berfungsi sebagai ekosistem penyangga dan zona konservasi. Alih fungsi lahan dan gambut, pemanfaatan lahan gambut yang tidak sesuai fungsinya dan perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan ancaman bencana kebakaran hutan di lahan gambut. Selain itu, Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara legal yang belum optimal menjadi isu penting dalam memperkuat kebijakan berbasis masyarakati dan kolaboratif.

Secara umum, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola kehutanan yang transparan, partisipatif, dan berbasis wilayah kelola hutan (KPH). Dinas Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada rehabilitasi dan perlindungan kawasan hutan secara terpadu, termasuk kawasan lindung, sempadan sungai, dan areal bekas terbakar, guna menjaga fungsi ekologis dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Dalam mendukung ketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana, kebijakan difokuskan pada upaya mitigasi perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan kelembagaan pengelola hutan.

Di sisi kelembagaan, arah kebijakan ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur, memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan kualitas layanan publik kehutanan melalui digitalisasi dan kemudahan akses informasi.

Berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Sumatera Selatan terdapat rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti untuk mencapai kinerja yang lebih baik pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu menjadi bahan acuandalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja guna perbaikan dan perencanaan kinerja tahun 2025.

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 didasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian outcome pada 5 Program, 18 kegiatan dan capaian output pada 44 sub kegiatan yang tertuang pada Dokumen Renja Tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan aktivitas organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi serta struktur organisasi sebagai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kehutanan dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke pemerintah provinsi mempunyai konsekuensi perubahan kewenangan pembentukan kelembagaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi menetapkan pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan.

Kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan seluas 36,85% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu 3.375.564 ha terdiri dari Hutan Konservasi seluas 768.177 ha, Hutan Lindung seluas 566.558 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 213.345 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 1.687.929 ha dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 139.555 ha. Kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi, sedangkan Hutan Konservasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

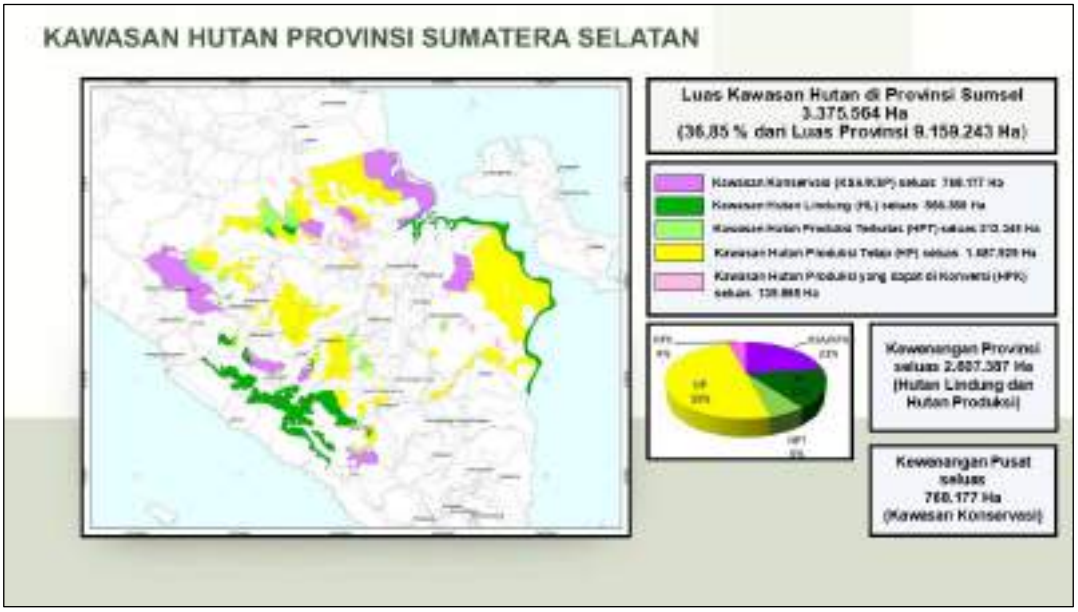

Gambar 1.1 Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1.1 Sebaran Kawasan Hutan Menurut Fungsi Hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan dan Perairan					
	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (SM, TWA, TN)	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ogan Komering Ulu	68.724	-	17.399	58.951	-	**145.075**
Ogan Komering Ilir	96.961	14.556	10.035	642.339	23.804	**787.695**
Muara Enim	57.736	8.700	26.425	152.489	8.616	**253.966**
Lahat	52.045	53.624	4.401	26.946	-	**137.016**
Musi Rawas	942	72.303	4.639	158.031	18.033	**253.948**
Musi Banyuasin	15.429	58.146	90.345	415.251	57.404	**636.575**
Banyuasin	62.619	345.045	-	64.133	30.209	**502.006**
Ogan Komering Ulu Selatan	115.079	40.916	10.064	7.586	-	**173.645**
Ogan Komering Ulu Timur	2.850	-	-	25.518	-	**28.368**
Ogan Ilir	-	-	-	100	352	**453**
Empat Lawang	65.919	2.559	4.555	3.230	-	**76.262**
Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	24.182	-	**24.182**
Musi Rawas Utara	1.136	168.062	43.297	109.172	1.137	**322.804**
Kota Palembang	-	50	-	-	-	**50**
Kota Prabumulih	-	-	1.157	-	-	**1.157**
Kota Pagar Alam	25.964	-	-	-	-	**25.964**
Kota Lubuklinggau	1.155	4.214	1.028	-	-	**6.397**
Sumatera Selatan	**566.558**	**768.177**	**213.345**	**1.687.929**	**139.555**	**3.375.564**

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.6600/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sampai Tahun 2024

Untuk pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

a) Pembinaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan;
b) Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang di dekonsentrasikan;
d) Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan para pihak di provinsi;
e) Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
f) Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan. Tugas UPTD yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan yang telah ditetapkan serta melaksanakan fasilitasi pengembangan unit-unit KPHP dan/atau KPHL dalam wilayah kerjanya. Dinas Kehutanan juga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPH berkedudukan di 16 kabupaten/kota. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

a. UPTD KPH Wilayah I Meranti berkedudukan di Sekayu
b. UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis berkedudukan di Bayung Lencir
c. UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin berkedudukan di Palembang
d. UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding berkedudukan di Kayu Agung
e. UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji berkedudukan di kayu Agung
f. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura berkedudukan di Batu Raja
g. UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka berkedudukan di Muara Dua
h. UPTD KPH Wilayah VIII Semendo berkedudukan di Muara Enim
i. UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji berkedudukan di Prabumulih
j. UPTD KPH Wilayah X Dempo berkedudukan di Pagar Alam
k. UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah berkedudukan di Lahat
l. UPTD KPH Wilayah XII Benakat berkedudukan di Talang Ubi
m. UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong di Lubuk Linggau
n. UPTD KPH Wilayah XIV Rawas di Muara Rupit.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Kehutanan sebagai implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, serta mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, terdiri dari: (1) Polisi Kehutanan (2) Penyuluh Kehutanan (3) Fungsional Perencana, dan (4) Fungsional Arsiparis.

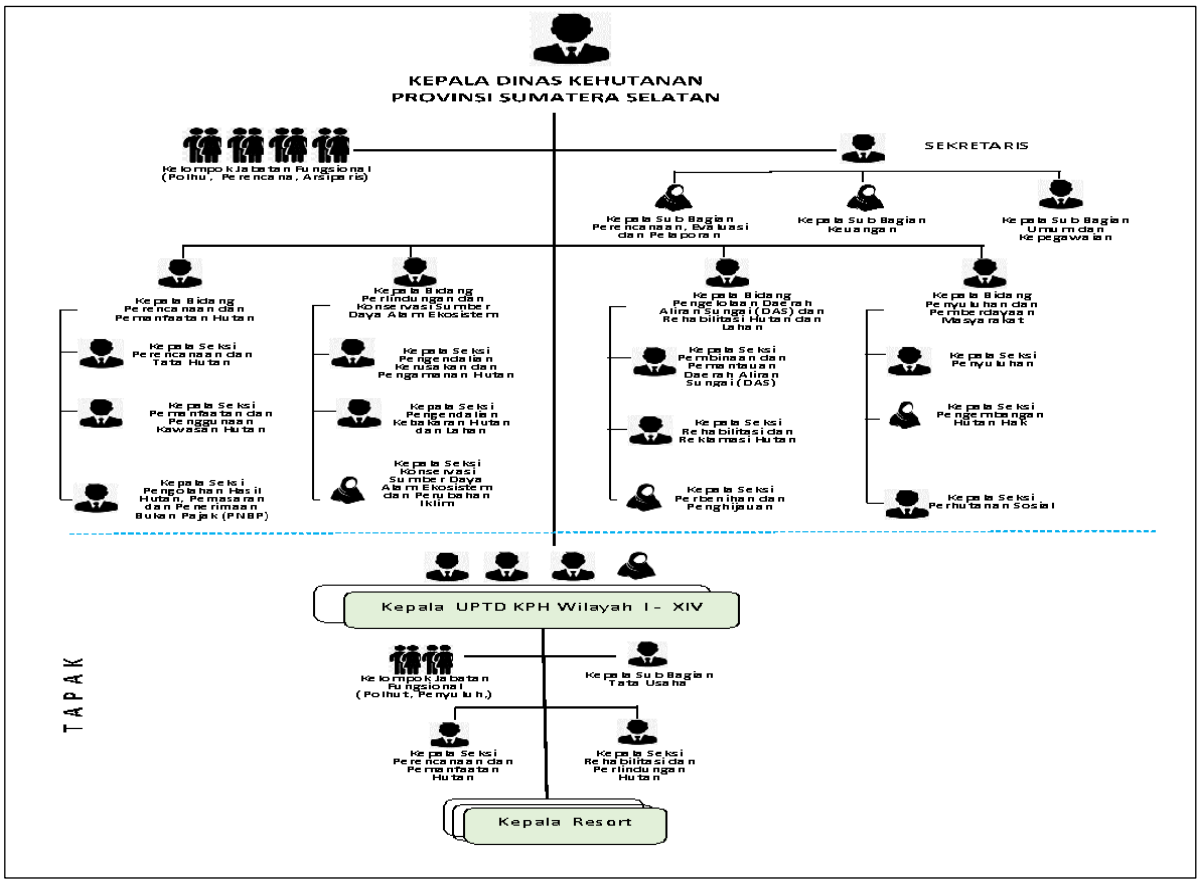

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Dukungan SDM Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Status dan Kompetensi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	PNS				PPPK				JUMLAH
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL			PELAKSANA	PENYULUH	PERENCANA	ARSIPARIS	
			PELAKSANA	PENYULUH	PERENCANA					
1	DINAS KEHUTANAN	18	55	3	4	84	5	2	2	173
2	UPTD KPH I WILAYAH MERANTI	2	12	2	0	2	0	0	0	18
3	UPTD KPH WILAYAH II LALAN MENDIS	4	0	3	0	13	1	0	0	21
4	UPTD KPH WILAYAH III PALEMBANG BANYUASIN	3	6	4	0	15	1	0	0	29
5	UPTD KPH WILAYAH IV SUNGAI- LUMPUR RINDING	3	4	1	0	22	1	0	0	31
6	UPTD KPH WILAYAH V LEMPUING MESUJI	4	3	2	0	14	1	0	0	24
7	UPTD KPH WILAYAH VI BUKIT NANTI MARTAPURA	4	16	5	0	15	3	0	0	43
8	UPTD KPH WILAYAH VII MEKAKAU SAKA	4	10	1	0	14	2	0	0	31
9	UPTD KPH WILAYAH VIII SEMENDO	3	5	1	0	3	2	0	0	14
10	UPTD KPH WILAYAH IX SUBAN JERIJI	4	4	4	0	12	1	0	0	25
11	UPTD KPH WILAYAH X DEMPO	4	14	1	0	5	1	0	0	25
12	UPTD KPH WILAYAH XI KIKIM PASEMAH	4	5	4	0	7	1	0	0	21
13	UPTD KPH WILAYAH XII BENAKAT	4	2	1	0	4	1	0	0	12
14	UPTD KPH WILAYAH XIII LAKITAN BUKIT COGONG	4	11	5	0	5	1	0	0	26
15	UPTD KPH WILAYAH XIV RAWAS	4	6	0	0	5	0	0	0	15
JUMLAH		**69**	**153**	**37**	**4**	**220**	**21**	**2**	**2**	**508**
		263				**245**				

Sumber : Sekretariat Dinas Kehutanan Prov. Sumsel, November 2025

Profil kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan baik yang ditempatkan di Kantor Dinas dan UPTD adalah sebagai berikut.

SDM berstatus ASN berjumlah 508 orang, 51,77% berstatus ASN PNS dan 48,23% berstatus ASN PPPK. Selain data tersebut di atas, terdapat pegawai Non ASN yang belum termasuk dalam PPPK paruh waktu sebanyak 23 orang.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Gender

Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan sebanyak 508 Orang dengan Proporsi gender laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. jumlah pegawai laki–laki 332 orang (65,35%) dan pegawai perempuan 176 orang (34,65%).

Pegawai di Kantor Dinas cukup besar (34,06%) dan selebihnya tersebar di 14 UPTD. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura memiliki jumlah pegawai yang paling banyak 43 orang, sedangkan UPTD KPH Wilayah XII Benakat memiliki jumah pegawai yang paling sedikit yaitu 12 orang. Jumlah pegawai UPTD yang lainnya memiliki sebaran pegawai yang beragam 14 sampai dengan 31 orang.

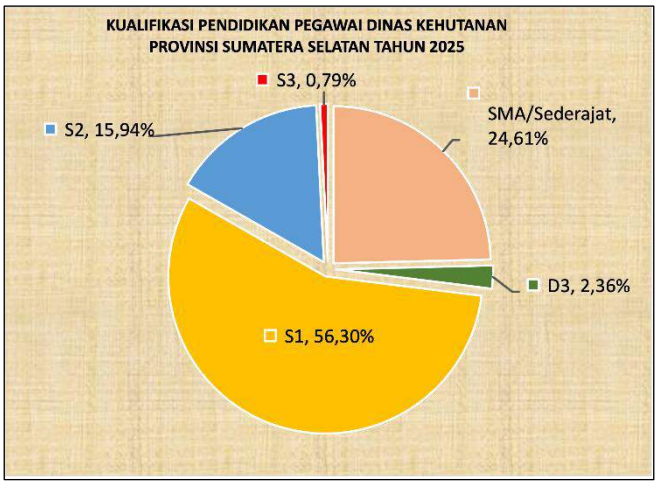

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Lebih dari setengah pegawai dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berpendidikan S1 (286 orang, 56,30%), sedangkan SLTA/sederajat (125 orang, 24,61%), D3 (12 orang, 2,36%), S2 (81 orang, 15,94%), dan S3 (4 orang, 0,79 %). Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 19 Eselon 3 yang terdiri 1 Kesekretariatan dan 4 bidang teknis dan 14 (empat belas) UPTD Kesatuan Pengelolaan hutan yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Proporsi SDM yang cukup besar karena harus mengawasi dan mengelola hutan negara yang kewenangan Provinsi seluas 2.607.387 ha (28,47% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan).

Luas wilayah kerja masing-masing UPTD cukup besar tidak diimbangi dengan jumlah tenaga teknis kehutanan yang ada di setiap KPH. Berdasarkan standar jangkauan pengawasannya, areal hutan seluas 10.000 Ha dipantau oleh 1 orang Polisi Kehutanan. Jumlah pegawai yang tidak seimbang ini menyebabkan lemahnya kontrol terhadap gangguan hutan seperti Illegal Loging, perambahan hutan, kebakaran hutan, dan perburuan satwa liar.

Selain itu kurang tenaga penyuluh juga menjadi kendala dalam pembinaan Perhutanan Sosial, rehabilitasi hutan dan kegiatan pengelolaan hutan lainnya. Dengan demikian UPTD perlu didukung oleh pegawai dengan kompetensi Penyuluh dan Pegawai Pendamping Petugas Teknis kehutanan.

Dukungan sarana dan prasarana pada lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan terutama pada kantor UPTD belum sepenuhnya memadai. Ruangan kantor masih berupa sewa Gedung atau pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten yaitu UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah di Lahat dan UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti di Baturaja.

Sarana kerja pada Kantor KPH juga belum memadai terutama sarana komputer dan transportasi. Kedua alat itu sangat penting untuk menunjang operasional UPTD dalam melaksanakan sosialisasi/patroli pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan, serta pendampingan masyarakat dalam Perhutanan Sosial. Sementara itu, rasio personal computer dan/atau laptop dibanding jumlah

pegawai yang ada di kantor induk maupun UPTD KPH belum cukup memadai. Hal ini menjadi salah satu penghambat kecepatan pelayanan publik.

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah (Unit)			Nilai (Rp)
		Dinas	UPTD	Total	
1	2	3	4	5	6
1	**Aset Tetap**				
1.1	**Tanah**				
1.1.1	Tanah Bagunan Rumah Negara Gol II	14	1	15	
1.1.2	Tanah Bagunan Rumah Negara Gol III	0	3	3	
1.1.3	Tanah Bangunan Gedung/Mess/Wisma/Asrama	0	1	1	
1.1.4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	29	33	
1.1.5	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	0	4	4	
1.1.6	Tanah Lapangan Tenis	1	0	1	
1.1.7	Tanah Persil Lainnya	0	1	1	
1.1.8	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	0	1	1	
1.1.9	Tanah Hutan Lainnya	0	1	1	
1.1.10	Tanah Non persil Lainnya (dst)	0	1	1	
1.1.11	Tanah Kaveling (dst)1	3	0	3	
1.2	**Gedung dan Bangunan**				
1.2.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	42	53	
1.2.2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	0	4	4	
1.2.3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	0	1	1	
1.2.4	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	2	
1.2.5	Bangunan Gudang Lain-lain	3	0	3	
1.2.6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	0	1	
1.2.7	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	0	1	
1.2.8	Gedung Pos Jaga Permanen	1	6	7	
1.2.9	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	0	2	2	
1.2.10	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	0	1	
1.2.11	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	0	1	
1.2.12	Bangunan Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	0	1	
1.2.13	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-Lain (dst)	1	0	1	
1.2.14	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (dst)	1	1	2	
1.2.15	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	7	0	7	
1.2.16	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	0	1	1	
1.2.17	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	6	0	6	
1.2.18	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1	0	1	
1.2.19	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	29	1	30	
1.2.20	Rumah Negara Golongan III Tipe A Semi Permanen	0	1	1	

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah (Unit)			Nilai (Rp)
		Dinas	UPTD	Total	
1	2	3	4	5	6
1.2.21	Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen	2	2	4	
1.2.22	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	0	3	3	
1.2.23	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-Lain (dst)	0	1	1	
1.2.24	Tugu Lainnya (dst) Pagar Permanen	0	1	1	
1.3	**Peralatan dan Mesin**				
1.3.1	Jeep	6	2	8	
1.3.2	Mini Bus	9	2	11	
1.3.3	Mesin proses lainnya (dst)	7	0	7	
1.3.4	Station Wagon	1	2	3	
1.3.5	Ranger double	0	1	1	
1.3.6	Kendaraan Dinas Bermotor (hibah)	1	1	2	
1.3.7	Pick Up	1	5	6	
1.3.8	Sepeda motor	42	150	192	
1.3.9	Portable water Pump	1	0	1	
1.3.10	Portabel Generating set	1	0	1	
1.3.11	Pompa lainnya	4	0	4	
1.3.12	Pompa Kebakaran/Portable	2	0	2	
1.3.13	PC	19	24	43	
1.3.14	Laptop	9	44	53	
1.3.15	Notebook	14	20	34	
1.3.16	GPS	1	0	1	
1.3.17	Sound System	-	-	7	
1.3.18	Printer	-	-	56	
1.3.19	A.C. Split	-	-	30	

Sumber data : Kesekretariatan November 2025

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Permasalahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

Dinas Kehutanan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan memiliki tanggung jawab strategis dalam mewujudkan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks dan multidimensional, sebagai berikut :

1. Pemanfaatan hutan yang diselenggarakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) belum optimal. Hal ini terkait dengan masih rendahnya realisasi tanaman pada areal efektif, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan serta Rap/Pan Karbon belum diusahakan secara optimal.
2. Pelaksanaan Rencana Operasional FOLU NET SINK belum optimal dan Skema RBP Carbon di Provinsi Sumatera Selatan belum terkoordinir.
3. Penyelesaian permasalahan kawasan hutan baik penguasaan tanah maupun penyelesaian sawit keterlanjuran termasuk penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Pembangunan New Pelabuhan Tanjung Carat juga merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemegang perizinan (PPKH, PBPH dan Pehutsos) belum secara optimal melaksanakan kewajiban perlindungan hutan sehingga berdampak pada berbagai aspek interaksi negatif manusia dengan satwa liar, kebakaran hutan dan lahan serta jual beli kawasan hutan.
5. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan sering tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera hal ini disebabkan kurangnya personil polisi hutan dan sarana prasarana.
6. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang belum optimal, Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani hutan, Lemahnya aksesibilitas petani (KTH/KPS) pada sumber permodalan dan industri hilir usaha tani hutan.
7. Kurangnya sinergitas para pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat KTH maupun KPS dalam pengelolaan hutan baik itu dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Perbankan, NGO, BUMS/BUMD. Belum terjalinnya kerjasama/kemitraan kehutanan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang masih rendah, rendahnya akses pemasaran hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu, keterbukaan akses pasar terhadap produk hutan rakyat yang masih kurang memadai, ketersediaan industri hilir yang menampung hasil hutan rakyat yang kurang memadai.
8. Kurangnya kualitas SDM Penyuluh Kehutanan yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan kompetensi termasuk prasarananya, pelibatan SDM kehutanan terhadap kegiatan pembangunan kehutanan yang masih kurang.

9. Laju pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak sebanding dengan luasnya lahan krtitis yang ada, hal ini disebabkan masih kurangnya anggaran pembiayaan baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi DAS merupakan kegiatan yang memerlukan kolabrorasi dan kerjasama multipihak seluruh jajaran pemerintah (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa) maupun swasta.
10. Penanaman Lahan kritis di luar Kawasan memerlukan keselarasan dengan pemilik lahan
11. Pelaksanaan rehabilitasi DAS melalui revegetasi tanaman belum mampu menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
12. Masih adanya asset yang belum disertifikasi.
13. Pengajuan formasi fungsional PEH, Penyuluh, Polhut belum selesai.
14. Sarana dan prasarana KPH, termasuk kantor dan kendaraan operasional, perlu alternatif pengadaan lainnya.
15. Updating data dana transfer daerah khususnya untuk sektor kehutanan belum mutakhir, maka diperlukan sinkronisasi tingkat pemerintah provinsi-pusat.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Nomor 5587 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Susunan Organisasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 48);
10. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 41).

E. Sistematika

Sistematika penulisan LKjIP sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang
B. Struktur Organisasi dan Tatakerja
C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
D. Landasan Hukum
E. Sistematika
F. Rekomendasi

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis
B. Rencana Kinerja

C. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

F. Hasil Evaluasi SAKIP dan Rekomendasi

Hasil koreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Tahun 2024 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Sumatera Selatan, dan akan ditidaklanjuti dalam penyusunan laporan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pada Bab I Pendahuluan belum menyajikan isu strategis dan arah kebijakan, hasil evaluasi SAKIP dan rekomendasi dibuat dalam bentuk laporan tidak lanjut sebagai lampiran dari perbaikan yang dilakukan dari Inspektorat.
2. Belum melampirkan Rencana Kinerja Tahunan.
3. Belum melampirkan pengukuran kinerja dilampirkan perjanjian kinerja.

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kehutanan Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rekomendasi dan sudah ditindak lanjuti sebagaimana lampiran.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pembangunan kehutanan kedepan dalam pengelolaannya lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Di Sumatera Selatan pengelolaan sektor kehutanan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu pengelolaan yang berorientasi pada kayu menjadi pengelolaan yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam. Selain itu dalam pengelolaan hutan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dalam jangka menengah, guna mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta kebutuhan dan karakteristik sumber daya hutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Renstra Dinas Kehutanan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026 (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah transisi untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Selanjutnya, Renstra ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029), khususnya dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kehutanan. Meskipun keduanya berbeda periode dan cakupan perencanaan, RPD Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2025-2026 saling berkaitan dan saling menunjang dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah. RPD bertindak sebagai dokumen perencanaan jangka menengah spesifik yang membantu memformulasikan program selama 3 tahun

pertama dari RPJMD yang lebih luas (5 tahun). Dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 dirumuskan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah pendek yang terutama disusun untuk mengisi masa transisi menjelang RPJMD baru.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah: SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA. Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Khususnya di sektor kehutanan partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Terdapat 7 Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk implementasi visi Sumsel Maju Terus Untuk Semua. Sektor kehutanan mendukung 3 misi sebagai berikut:

Misi 2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim

Misi 6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dan telah ditetapkan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan sasaran berdasarkan RPD dan RPJMD sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja	RPD 2024-2026	RPJMD Tahun 2025-2029
Tujuan Renstra	Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan
Sasaran Renstra	1. Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan 2. Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. 3. Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan 4. Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial 5. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah 2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) 3. Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 4. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan 5. Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga 6. Meningkatnya tata kelola Organisasi Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama Renstra	1. Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah) 2. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi) 3. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%) 4. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha) 5. Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%) 6. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok) 7. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	Persentase tutupan lahan (%)
Indikator Kinerja Kunci	1. Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial 2. Persentase Kerusakan Hutan Pertahun (Deforestasi) 3. Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) 2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%) 3. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%) 4. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)

Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja	RPD 2024-2026	RPJMD Tahun 2025-2029
		5. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%) 6. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%) 7. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka) 8. Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka) 9. Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%) 10. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%) 11. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%) 12. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)

Sumber : Renstra Transisi Dishut Tahun 2024-2026 dan Renstra Dishut tahun 2025-2029

Sasaran merupakan kondisi atau hasil yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu sebagai penjabaran dari tujuan pembangunan. Sasaran menggambarkan perubahan yang diharapkan, baik dalam aspek tata kelola, kualitas layanan, maupun dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi sebagai alat ukur strategis yang merepresentasikan capaian hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Selanjutnya, pencapaian IKU didukung oleh Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara lebih operasional. IKK berorientasi pada keluaran (output) dan capaian kinerja antara yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKU. Dengan kata lain, IKK menjadi indikator pengendalian pelaksanaan yang memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan selaras dan konsisten dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU dan IKK yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan merupakan penjabaran RPD dan RPJMD, juga diselaraskan dengan amanah Inmendagri No 2 Tahun 2025 dan Indikator Lingkungan Hidup dalam RPJMN 2025-2045 sektor kehutanan yang bertujuan untuk menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat

dan daerah provinsi karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Target IKU dan IKK yang telah ditetapkan selama periode Renstra sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2022	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	89,06		73,80	77,48	81,36				
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	12		36	61	82				
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	4,94		10,51	12,19	15,76				
Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	279,32		10	10	20				
	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	8,19		0,14	0,14	0,14				
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	92		140	175	200				
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100		100	100	100				
	Persentase tutupan lahan (%)		**N/A**		**18,8**	**19,1**	**19,4**	**19,7**	**20**	**20,3**
Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		N/A		0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35
	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)		N/A		1,63	1,86	2,09	2,31	2,54	2,77
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		N/A		6	8	9	10	11	12

SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2022	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		N/A		3	4	5	6	7	8
	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)		30,77		39,1	42,09	44,56	46,64	48,42	49,95
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)		0,458		0,408	0,367	0,333	0,303	0,277	0,255
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)		N/A		0,568	0,615	0,669	0,728	0,792	0,863
	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)		N/A		3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092
Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)		0,120		0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)		N/A		1,68	1,69	1,70	1,71	1,72	1,73
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)		100		100	100	100	100	100	100
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)		N/A		85/A	86/A	87/A	88/A	89/A	90/A

B. Rencana Kinerja

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja tahun 2025 disusun dan ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berlaku, yang perumusannya mengacu pada dua dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD dan RPJMD) sebagaimana diterangkan pada Bab I. Target kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3	4
Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	77,48
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	61
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10
		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	175
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100
Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		**Persentase tutupan lahan (%)**	**18,8**
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25
		Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3	4
	keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568
		Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13
		Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100
		Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85/A

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasiTujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis (Pohon Kinerja /*Cascading*)**.** Skema pohon kinerja bertujuan mencari atau menentukan akar permasalahan, diharapkan mendapatkan fokus kinerja yang menjadi prioritas.

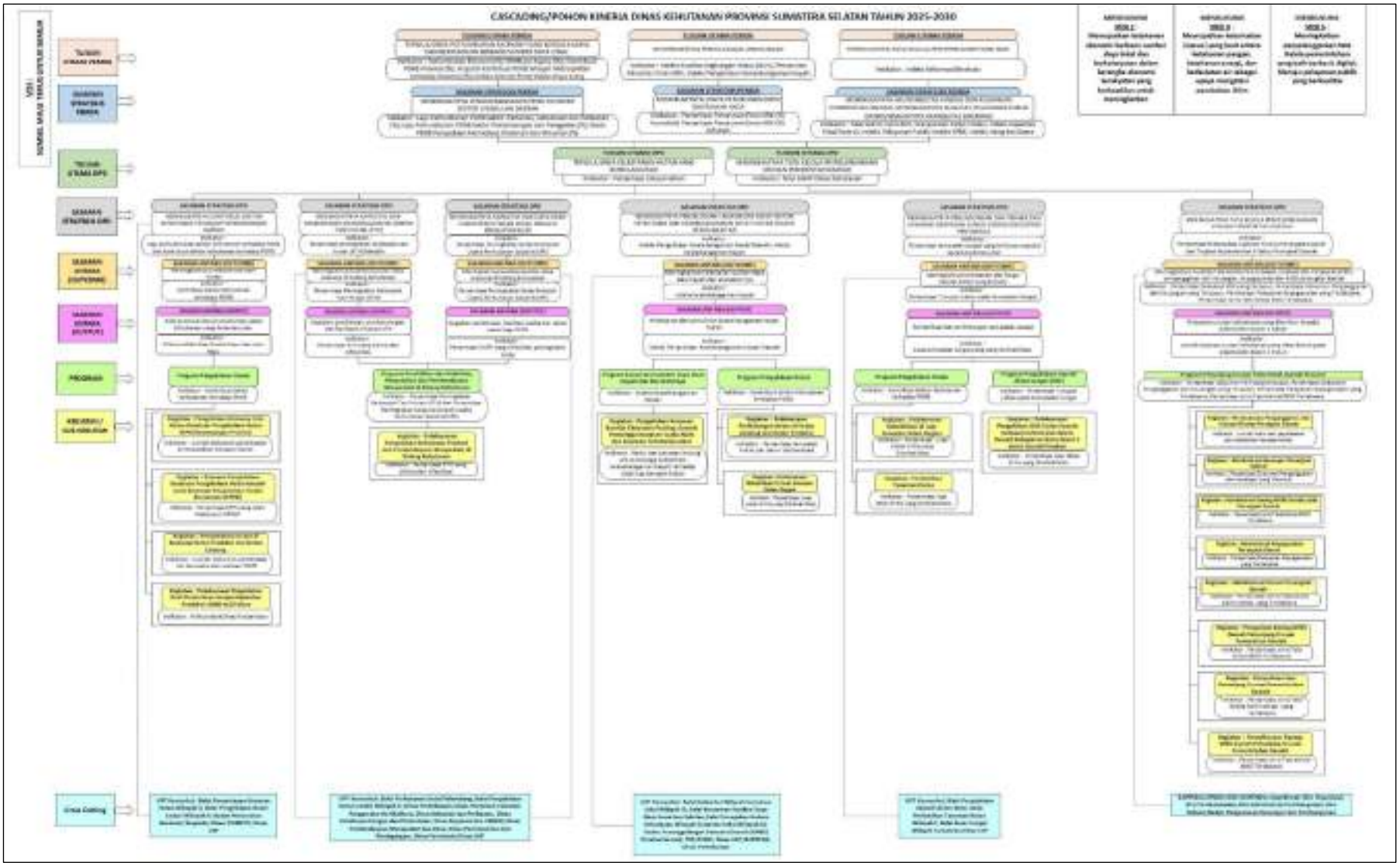

Gambar 2.1 Pohon Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 didukung anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Terdapat perbedaan target rencana kerja dari Renstra Transisi Dinas Kehutanan Tahun 2024-2026 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian target berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia. Sumberdana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi, dan DBH Sawit.

Alokasi anggaran tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja Induk yang ditetapkan sebagaimana DPA Nomor DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2024. Pagu anggaran Rp 64.300.891.378,- Selanjutnya terdapat pergeseran pada APBD sebagaimana DPPA Nomor DPPA/A.2/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal Mei 2025 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.004.880.365,- (1,59%) sehingga total pagu anggaran Dinas Kehutanan semula Rp. 64.124.891.378,- menjadi Rp. 63.205.511.013,- Pada APBD-P sebagaimana DPPA Nomor DPPA/A.3/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 22 September 2025 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 7.917.158.928,- sehingga total pagu anggaran Dinas Kehutanan semula Rp. 63.205.511.013,- menjadi Rp. 72.218.050.305,- Rincian dan proporsi belanja DPA sebagai berikut :Rincian berdasarkan belanja seperti tabel berikut :

Tabel 2.4 Rincian Belanja pada DPA APBD Tahun 2025

Uraian	DPA Induk		DPA Pergeseran		DPA Perubahan	
	Rp.	Proporsi Induk (%)	Rp.	Proporsi Pergeseran (%)	Rp.	Proporsi Perubahan (%)
1. Belanja Operasi	64.124.891.378	99,73	63.120.011.013	99,86	71.886.514.843	99,54
a. Belanja Pegawai	47.163.336.700	73,35	51.826.752.335	82,00	51.296.882.665	71,03
b. Belanja Barang dan Jas	16.961.554.678	26,38	11.293.258.678	17,87	20.589.632.178	28,51
2. Belanja Modal	176.000.000	0,27	85.500.000	0,14	331.535.463	0,46
Pagu	64.300.891.378	100	63.205.511.013	100	72.218.050.306	100

Belanja Dinas Kehutanan yang terbesar pada belanja pegawai. Pada DPA Pergeseran dan Perubahan terdapat penambahan belanja pegawai disebabkan adanya pegawai PPPK dan tenaga Non ASN lainnya. Selain itu alokasi DBH DR ditetapkan pada DPA Pergeseran dan Alokasi DBH Sawit ditetapkankan pada DPA Perubahan. Penggunaan DBH DR dan Sawit untuk kegiatan-kegiatan Pembangunan kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Total alokasi pagu pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp 72.218.050.306,- berdasarkan sumberdananya sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sumber Dana pada APBD Perubahan 2025

Sumber Dana	Jumlah (Rp.)	Prosentase (%)
1. Dana Alokasi Umum (DAU)	30.172.643.665	41,78%
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33.404.559.513	46,26%
3. Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH DR)	6.319.231.128	8,75%
4. Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit)	2.321.616.000	3,21%
Total Pagu	72.218.050.306	

Dana Pembangunan kehutanan yang berasal dari transfer ke daerah (DBH DR dan Sawit) sebesar 11,96% dari total APBD 2026 sangat menunjang dalam pencapaian kinerja mengingat DAU dan sebagian PAD membiayai belanja pegawai (71% dari pagu).

Dari uraian di atas, perencanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2025 mempertimbangkan berbagai hal seperti dokumen renstra, masukan dari DPR, kebijakan pegawai PPPK. Selain itu juga mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja tahun lalu hasil rekomendasi dari evaluasi internal. Beberapa kegiatan yang diadakan sebagai hasil Evaluasi internal tahun 2024 dan mengatasi hambatan kinerja tahun lalu sebagai berikut :

a. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, untuk mendukung kinerja pengendalian kebakaran hutan.
b. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Tingkat KPH sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan hutan agar terencana dan terintegrasi dengan baik.
c. Rehabilitasi mangrove merupakan tantangan dari kinerja rehabilitasi lahan pada daerah pesisir dan riparian.
d. Pembangunan bangunan teknik konservasi tanah dan air seperti Pembangunan sumur resapan, gully plug, dam penahan mendukung kinerja rehabilitasi lahan
e. Pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan untuk mendukung kinerja peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik, alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025 pada 5 Program, 18 kegiatan dan capaian output pada 44 sub kegiatan yang tertuang pada Dokumen Renja Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi menjadi pembiayaan terbesar 81,41% dan pembiayaan pembangunan kehutanan yang terbagi dalam 4 program hanya sebesar 19,59%.

Gambar 2.2 Program dan Pagu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai pagu dan indikator output sub kegiatan dirinci sebagai berikut :

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perencanaan kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2025 tergambar dalam dokumen perjanjian kinerja yang disertai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun serta dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang telah disesuaikan pada tahun yang bersangkutan. Melalui perjanjian kinerja diharapkan dapat mewujudkan komitmen komitmen yang tercermin dalam sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan dan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja selama satu tahun.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai yang tercantum dalam Renstra PD sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan jangka menengah terbagi menjadi 2 (dua) periode yaitu Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Januari – September

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025
Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	77,48
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	61

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19
Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10
	5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	175
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100

Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Januari – September terdiri dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti dijelaskan pada tabel 2.7. Sedangkan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Oktober – Desember terdapat 1 (satu) IKU yaitu Persentase Tutupan Lahan yang dijelaskan pada tabel 2.8. IKU Persentase Tutupan Lahan (Level 1) ini ditunjang oleh 12 indikator kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh level 3 dibawah Kepala Dinas yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Fungsional Perencana Madya, Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, dan Polisi Kehutanan Ahli Madya. Selanjutnya Perjanjian kinerja dan target Dinas Kehutanan dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari Kepala Dinas ke Sekretaris/ Kepala Bidang / Kepala UPTD / Fungsional Madya ke Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Fungsional Muda ke pelaksana / Fungsional Pertama (individu).

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Oktober – Desember

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025
	Persentase tutupan lahan (%)		**18,8**
Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25
	2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6
	4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025
Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	**6**	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408
	8	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568
	9	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092
Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	**10**	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13
	11	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	**12**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100
	13	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85/A

Perjanjian kinerja ini dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada program-program bidang kehutanan yang berkaitan dengan peningkatan produksi kayu dan penerimaan negara dari subsektor kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penurunan kerusakan kawasan hutan, penurunan luas kebakaran hutan, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, dan perhutanan sosial serta penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Capaian kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dan capaian dengan tahun sebelumnya dan target yang ingin dicapai pada periode akhir RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yng telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Kinerja yang diukur dalam LKjIP adalah capaian kinerja indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan. Namun capaian kinerja sasaran strategis dipengaruhi pula oleh capaian kinerja kegiatan, oleh sebab itu maka pengukuran kinerja kegiatan merupakan salah satu bagian dari proses penghimpunan data dalam pengukuran kinerja sasaran strategis. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa input (masukan), output (keluaran) dan outcomes (hasil).

Evaluasi kinerja merupakan salah satu bahan masukan dalam perencanaan kinerja periode yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu kinerja sasaran, program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kunci pada tahun 2025 dengan target, membandingkan dengan kinerja dengan tahun sebelumnya, membandingkan

dengan target periode akhir dan membandingkan dengan kinerja pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).

Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diketahui dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKU/IKK). Tabel 3.2 menggambarkan keterkaitan yang utuh antara tujuan, sasaran, serta IKU/IKK yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan sektor kehutanan pada Tahun 2025. Setiap indikator disajikan dengan target, realisasi, tingkat capaian, dan kriteria penilaian, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pengelolaan hutan secara lestari serta terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Secara umum, realisasi IKU dan IKK Dinas Kehutanan Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan atau capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana sebagian besar indikator mencapai kriteria sangat tinggi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut terlihat pada indikator peningkatan produktivitas kawasan hutan melalui pembayaran PNBP, penguatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan mangrove, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan. Selain itu, peningkatan kinerja perhutanan sosial, kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, serta pengelolaan keanekaragaman hayati juga menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan kehutanan

yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan sebagai pengejawantahan dari Visi dan Misi Gubernur yaitu Pengelolaan Hutan Secara Lestari dan Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator dengan capaian yang perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada periode perencanaan selanjutnya. Capaian IKK 2.4 menunjukkan capaian sedang, namun capaian ini masih bersifat masih sementara, karena terdapat usulan beberapa kelompok tani hutan/ kelompok Masyarakat yang telah difasilitasi oleh Dinas Kehutanan masih dalam proses pembahasan hasil verifikasi lapangan dan belum terbit persetujuan perhutanan sosial oleh Menteri Kehutanan sehingga belum dapat dicatat sebagai hasil kinerja tahun ini. **Upaya percepatan perlu dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar kendala-kendala dan persyaratan usulan perhutanan sosial dapat diketahui dan segera dipenuhi untuk mempercepat proses penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan**.

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN(%)	KRITERIA
1	2	3		4	5	6	7
Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rp)	77.484.874.860,00	109.981.335.177,16	141,94	Sangat tinggi
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	61	261	427,87	Sangat tinggi
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19	28,84	236,61	Sangat tinggi
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	512,44	5.124,40	Sangat tinggi
		1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,17	121,43	Sangat tinggi
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	175	209	119,43	Sangat tinggi
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	Sangat tinggi
Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		**2**	**Persentase tutupan lahan (%)**	**18,8**	**18,8**	**100,00**	**Sangat tinggi**
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25	0,91	364,00	Sangat tinggi
		2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63	3,89	238,65	Sangat tinggi
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6	12,82	213,67	Sangat tinggi
		2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3	4,63	154,33	Sangat tinggi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN(%)	KRITERIA
1	2	3		4	5	6	7
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1	29,36	75,09	Sedang
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408	0,214	190,65	Sangat tinggi
		2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568	0,681	119,89	Sangat tinggi
		2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092	3,092	100,00	Sangat tinggi
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13	0,46	353,85	Sangat tinggi
		2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68	2,56	152,38	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	Sangat tinggi
		2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85	80,72	94,96	Sangat tinggi

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 menyajikan perbandingan kinerja indikator pembangunan sektor kehutanan antara Tahun 2025 dan Tahun 2024, yang mencakup tujuan, sasaran, IKU/IKK, target, realisasi, tingkat capaian, serta kriteria penilaian. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja dari tahun ke tahun sekaligus menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pengelolaan hutan secara lestari dan terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dalam tabel, sebagian besar indikator yang telah diukur pada kedua tahun menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian Tahun 2025 umumnya berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi serta beberapa indikator mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada indikator produktivitas kawasan hutan melalui realisasi pembayaran PNBP, pendampingan kelompok perhutanan sosial, serta penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan yang mengalami peningkatan signifikan.

Namun, beberapa indikator yang meskipun capaian **Tahun 2025 tetap tinggi, menunjukkan penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024, seperti pada kegiatan patroli pengamanan kawasan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.** Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan strategi pelaksanaan dan fokus kegiatan pada masing-masing tahun. Tahun 2025 faktor cuaca lebih lembab dari tahun lalu, kegiatan patroli diarahkan lebih difokuskan untuk sosialisasi dan patroli terhadap lokasi-lokasi rawan kebakaran dan rawan gangguan hutan lainnya berdasarkan peta rawan kebakaran hutan dan peta gangguan hutan yang disusun melalui analisis historis, biofisik dan sosial wilayah.

Pada tabel 3.3 juga menunjukkan adanya sejumlah indikator baru berdasarkan RPJMD pada Tahun 2025 yang sebelumnya belum diukur pada Tahun 2024. Indikator tersebut merupakan amanah dari Kemendagri Nomor 2 tahun 2025 khususnya berkaitan dengan kualitas lingkungan, kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, penguatan kelembagaan KTH dan KUPS, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta perlindungan kawasan sempadan sungai.

Indikator baru ini mencerminkan penguatan sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan kinerja ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan sektor kehutanan, baik dari aspek produktivitas, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, maupun tata kelola perangkat daerah.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		KINERJA 2025			KINERJA 2024			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2024		KRITERIA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	77,48	109,98	141,94	73,80	99,37	134,66	110,68	105,41	Sangat Tinggi
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	61	261,00	427,87	36	171	475,00	152,63	90,08	Tinggi
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19	28,84	236,61	10,51	36,75	349,67	78,48	67,67	Sedang
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	512,44	5124,40	10	130,08	1300,80	393,94	393,94	Sangat Tinggi
		1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,17	121,43	0,14	0,22	157,14	77,27	77,27	Tinggi
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	175	209,00	119,43	140	165	117,86	126,67	101,33	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	100	95,45	95,45	97,51	97,51	Sangat Tinggi
Terwujudnya		**2**	**Persentase tutupan lahan (%)**	**18,8**	**18,80**	100,00	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		KINERJA 2025			KINERJA 2024			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2024		KRITERIA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25	0,91	364,00	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru
		2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63	3,89	238,65	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6	12,82	213,67	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3	4,63	154,33	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru
		2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1	29,36	75,09	NA	30,77	NA	95,42	NA	Indikator baru
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408	0,21	190,65	NA	0,458	NA	46,72	NA	Indikator baru
		2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568	0,68	119,89	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru
		2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092	3,092	100,00	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13	0,46	353,85	NA	0,120	NA	383,33	NA	Indikator baru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		KINERJA 2025			KINERJA 2024			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2024		KRITERIA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68	1,41	83,93	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	100	95,45	95,45	97,51	97,51	Sangat Tinggi
		2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85	80,72	94,96	NA	84,7	NA	95,30	NA	Indikator baru

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis menyajikan perkembangan kinerja indikator pembangunan sektor kehutanan dengan membandingkan realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 terhadap target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 serta target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2029. Penyajian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kemajuan (progress) pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan, sekaligus menilai konsistensi arah kebijakan jangka pendek dan menengah dalam mendukung pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan data pada tabel, sebagian besar indikator menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan, bahkan telah melampaui target akhir RPD 2026 dan menunjukkan capaian yang sangat baik menuju target RPJMD 2029. Hal tersebut terlihat pada indikator produktivitas kawasan hutan melalui peningkatan pembayaran PNBP, intensitas patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove, rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, penurunan laju deforestasi, serta rehabilitasi kawasan sempadan sungai. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi hutan sekaligus penguatan fungsi lindung dan ekologisnya.

Di sisi lain, beberapa indikator masih memerlukan penguatan dan percepatan untuk mencapai target jangka menengah dan jangka panjang, **khususnya pada indikator peningkatan kelas KUPS, perluasan akses legal perhutanan sosial, tutupan lahan pada sempadan sungai, serta pemenuhan layanan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.** Meskipun demikian, secara keseluruhan tingkat kemajuan kinerja menunjukkan tren positif dan memberikan keyakinan bahwa dengan penguatan strategi, sinergi lintas sektor, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan, target pembangunan kehutanan sebagaimana tertuang dalam RPD 2026 dan RPJMD 2029 dapat dicapai secara optimal.

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RPD 2026	TARGET AKHIR RPJMD 2029	CAPAIAN 2025 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	99,37	109,98	81,36		135,18
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	171	261,00	82		318,29
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	36,75	28,84	15,76		183,01
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	130,08	512,44	20		2.562,20
		1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,22	0,17	0,14		121,43
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	165	209,00	200		104,50
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	95,45	93,07	100		93,07
Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		**2**	**Persentase tutupan lahan (%)**	**18,8**	**18,80**		**20**	94,00
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25	0,91		0,33	275,76
		2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63	3,89		2,54	153,15

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RPD 2026	TARGET AKHIR RPJMD 2029	CAPAIAN 2025 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6	12,82		11	116,55
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3	4,63		7	66,14
		2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1	29,36		48,42	60,64
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408	0,21		0,277	129,44
		2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568	0,68		0,792	85,98
		2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092	3,092		3,092	100,00
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13	0,46		0,17	270,59
		2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68	1,41		1,72	81,98
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07		100	93,07
		2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85/A	80,72		89	90,70

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang mendukung pembangunan Nasional dibidang kehutanan. Terdapat 5 (lima) outcome Prioritas Nasional kinerja K/L yang dilakukan pembahasan dengan Daerah. Merujuk pada Berita Acara Koordinasi teknis Perencanaan Bidang Kehutanan Tahun 2025 antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh realisasi sebagai berikut:

Berdasarkan perbandingan kinerja antara Provinsi Sumatera Selatan dan capaian nasional pada tahun 2025, terlihat variasi tingkat kontribusi dan pencapaian antar indikator outcome prioritas. Pada indikator Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial (KUPS), Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi mencapai Rp42,99 miliar atau 99,98% dari target provinsi, serta berkontribusi 2,38% terhadap realisasi nasional sebesar Rp1,805 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja provinsi relatif optimal dan sejalan dengan arah peningkatan kemandirian usaha KUPS secara nasional. Sebaliknya, pada indikator Nilai transaksi ekonomi KTH, meskipun realisasi nasional sangat tinggi dan jauh melampaui target, kinerja Provinsi Sumatera Selatan masih sangat rendah, dengan realisasi hanya Rp21,61 juta atau 0,86% dari target provinsi, serta kontribusi yang nyaris tidak signifikan terhadap capaian nasional. Pada outcome distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, Provinsi Sumatera Selatan merealisasikan 588,83 ha atau 23,55% dari target provinsi, dengan kontribusi 1,91% terhadap realisasi nasional, menunjukkan adanya kemajuan meskipun masih memerlukan percepatan.

Sementara itu, pada indikator-indikator rehabilitasi hutan dan lahan, baik secara vegetatif, rehabilitasi mangrove, maupun pembangunan sipil teknis, kinerja provinsi relatif masih rendah atau belum terealisasi optimal, bahkan pada beberapa indikator capaian nasional belum tersedia (NA). Pada Pembangunan mangrove, terdapat realisasi sebesar 7 ha meskipun pada awal perencanaan belum dianggarkan. Melalui dana transfer ke daerah (DBH DR) mangrove dapat dibangun mengingat program ini sangat strategis dampaknya bagi bentang alam di atasnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kinerja nasional, Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan dalam percepatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga diperlukan penguatan perencanaan, dukungan anggaran, serta kolaborasi multipihak agar kontribusi provinsi terhadap target nasional dapat ditingkatkan pada periode berikutnya.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tingkat Nasional Tahun 2025

No.	Outcome Prioritas	Indikator Outcome Prioritas	Satuan	Tahun 2025				Realisasi Prov terhadap Target Prov	Realisasi Prov terhadap Realisasi Nasional
				Nasional		Provinsi Sumatera Selatan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kemandirian usaha KUPS	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	Rupiah/ Kapita	1.500.000.000.000	1.805.125.515.512	43.000.000.000	42.991.224.445	99,98	2,38
2	Peningkatan kemandirian usaha KTH	Nilai transaksi ekonomi KTH	Rupiah/ Kapita	700.000.000.000	3.403.080.725.667	2.500.000.000	21.610.800	0,86	0,00
3	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha	1.000.000	30.843,65	2.500	588,83	23,55	1,91
4	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	Unit	3.675	NA	11	0		
5	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	Ha	210.000	NA	NA	19,625		
4	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	40.000	NA	500	9,6		
5	Rehabilitasi hutan mangrove	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	Ha	16.000	NA	0	7		

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Kinerja Dinas Kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan hutan pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik, sebagaimana ditunjukan pada Tabel 3.6. Tercermin dari sebagian besar indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang melampaui target. Keberhasilan ini mencerminkan semakin efektifnya pengelolaan hutan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, perlindungan sumber daya alam, serta penguatan peran sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Peningkatan penerimaan PNBP sektor kehutanan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan, yang didorong oleh meningkatnya produksi kayu pada pemegang PBPH, penyelesaian kewajiban PNBP oleh pemegang PPKH, serta percepatan pembayaran pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan strategis.

Upaya pengurangan kerusakan hutan dan ekosistem menunjukkan hasil yang sangat signifikan, tercermin dari tingginya capaian patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove serta peningkatan cakupan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Peningkatan frekuensi patroli, efektivitas deteksi dini, respons cepat terhadap potensi gangguan, serta dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor utama keberhasilan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat sekitar kawasan hutan berperan penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi pendanaan dari berbagai sumber, tingginya komitmen dan partisipasi masyarakat, serta keberadaan kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). **Dukungan dokumen perencanaan, seperti RTnRL, menjadi pedoman penting dalam penentuan lokasi prioritas penanaman, sehingga pelaksanaan rehabilitasi lebih terarah dan efektif. Selain itu, kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH dan penguatan sosialisasi oleh Dinas Kehutanan dan KPH turut mempercepat pencapaian target rehabilitasi.**

Dalam aspek pengembangan perhutanan sosial, capaian kinerja yang melampaui target mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Kehutanan, mitra pembangunan, NGO, BUMN, dan sektor swasta.

Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan telah meningkatkan kapasitas kelembagaan, kemandirian, serta daya saing Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Namun demikian, indikator peningkatan akses legal perhutanan sosial belum sepenuhnya mencapai target, yang disebabkan oleh proses persetujuan perhutanan sosial yang masih berlangsung di tingkat Kementerian Kehutanan dan diperkirakan akan selesai pada tahun berikutnya.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, tercermin dari tingginya laju pertumbuhan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya produksi kayu dan aktivitas ekonomi sektor kehutanan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang produktif, legal, dan berkelanjutan mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, kinerja perangkat daerah secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Beberapa kendala masih ditemui, terutama terkait koordinasi dan ketepatan waktu perencanaan yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan proses penganggaran. Selain itu, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan keterbukaan informasi masih perlu dioptimalkan. Kondisi ini menjadi dasar bagi upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas layanan kinerja perangkat daerah pada periode berikutnya.

Secara rinci analisis keberhasilan masing-masing IKU dan IKK serta tindklanjut/solusi yang dilakukan sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2		3	4	5	6	7
I. Pengelolaan Hutan							
1. Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	77	109,98	141,94	Keberhasilan didorong oleh : 1. Pembinaan terhadap PBPH sehingga Produksi Kayu meningkat. 2. Koordinasi dengan PPKH Bendungan Tiga dihaji (BBWS) untuk menyelesaikan kewajibannya membayar PNBP. 3. Melakukan percepatan proses pembayaran pelepasan kawasan hutan Pelabuhan Tanjung Carat	
2. Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	61	258	422,95	Keberhasilan didorong adanya: 1. Peningkatan frekuensi patroli rutin dan patroli terpadu. 2. Peningkatan deteksi dini dan respons cepat. 3. Efektivitas koordinasi dalam penanganan temuan dan penegakan hukum. 4. Ketersediaan kendaraan, alat komunikasi, dan perlengkapan patroli. 5. Pemanfaatan data patroli sebagai bahan evaluasi dan perencanaan 6. Tindak lanjut hasil patroli (pembinaan, peringatan, penegakan hukum)	

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2		3	4	5	6	7
3. Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19	28,84	236,61	1. Adanya perencanaan pencegahan Karhutla yang berbasis peta rawan. 2. Tersedianya dan kesiapan sumber daya manusia. 3. Terlaksananya patroli pencegahan secara rutin dan terpadu. 4. Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. 5. Dukungan sarana dan prasarana pencegahan. 6. Koordinasi dan sinergi lintas sektor terkait memperkuat pelaksanaan pencegahan Karhutla secara menyeluruh. 7. Penggunaan data hotspot, informasi cuaca, dan sistem pelaporan lapangan membantu memastikan kegiatan pencegahan dilakukan pada lokasi dan waktu yang tepat.	
4. Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	512,44	5.124,40	1. Adanya program penanaman melalui sumber dana APBN, APBD, Pihak ke tiga dan Swadaya masyarakat. 2. Adanya komitmen masyarakat dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 3. Sudah terbentuknya kelompok masyarakat dalam upaya RHL. 4. Adanya Dokumen RTnRL sebagai panduan untuk menentukan lokasi prioritas penanaman.	

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2		3	4	5	6	7
	1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,17	121,43	Keberhasilan didorong adanya: 1. Kewajiban bagi pemegang PPKH untuk melakukan Rehabilitasi DAS. 2. Adanya surat teguran dari Kementrian Kehutanan terkait pemenuhan kawajiban penanaman rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH. 3. Adanya Program Rehabilitasi melalui sumber dana APBN. 4. Dinas Kehutanan dan KPH aktif memberikan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat hutan.	
5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	175	209	119,43	Adanya kolaborasi dan koordinasi serta dukungan dari Kementerian Kehutanan, Mitra Pembangunan/ NGO, BUMN, dan Swasta untuk melaksanakan Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial	
6. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	Keberhasilan didorong oleh profesionalitas kesekretariatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan	
II. Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan	2	**Persentase tutupan lahan (%)**	**18,8**	**18,8**	**100,00**	Dinamika Perubahan tutupan lahan diukur dalam waktu 1 tahun maka data persentase tutupan lahan pertriwulan maupun perbulan belum dapat disajikan	
7. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25	0,91	364,00	Keberhasilan didorong oleh jumlah produksi kayu meningkat dari tahun sebelumnya	
	2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63	3,89	238,65	Keberhasilan didorong oleh jumlah produksi kayu meningkat dari tahun sebelumnya	

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2		3	4	5	6	7
8. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6	12,82	213,67	Fasilitasi pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) juga dilakukan Kementerian Kehutanan, Mitra Pembangunan/NGO, dan BUMN	
9. Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3	4,63	154,33	Fasilitasi pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) juga dilakukan Kementerian Kehutanan, Mitra Pembangunan/NGO, dan BUMN	
	2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1	29,36	75,09	Pencapaian dibawah target disebabkan oleh Pengajuan Persetujuan Perhutanan Sosial masih dalam tahap pembahasan di Kementerian Kehutanan, hal ini dimungkinkan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial terbit di tahun 2026.	Koordinasi secara intens dengan Kementerian Kehutanan
10. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408	0,214	190,65	Hasil data yang dikumpulkan dari analisa tutupan lahan 2024.	
	2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568	0,681	119,89	Belum didapat perhitungan realisasi atau sumberdata indeks	Koordinasi Kementerian Kehutanan ke
	2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092	3,092	100,00	Belum didapat perhitungan realisasi atau sumberdata indeks	Koordinasi Kementerian Kehutanan

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2		3	4	5	6	7
11. Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13	0,46	353,85	Keberhasilan didorong : 1. Adanya program penanaman melalui sumber dana APBN, APBD, Pihak ke tiga dan Swadaya masyarakat. 2. Adanya komitmen masyarakat dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 3. Sudah terbentuknya kelompok masyarakat dalam upaya RHL. 4. Adanya Dokumen RTnRL sebagai panduan untuk menentukan lokasi prioritas penanaman.	
	2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68	2,56	152,38	Keberhasilan didorong : 1. Adanya Kewajiban bagi pemegang PPKH untuk melakukan Rehabilitasi DAS. 2. Adanya surat teguran dari Kementrian Kehutanan terkait pemenuhan kawajiban penanaman rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH. 3. Adanya Program Rehabilitasi melalui sumber dana APBN. 4. Dinas Kehutanan dan KPH aktif memberikan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat hutan.	
12. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena koordinasi yang belum optimal dan tata waktu kegiatan pada tataran perencanaan kurang tepat terkait dengan proses penganggaran.	
	2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85	80,72	94,96	Implementasi keterbukaan informasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimalnya	

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu dalam kebehasilan capaian kinerja. Sumber daya yang dimiliki oleh setiap OPD menjadi kekuatan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sumber daya dapat diartikan sebagai dana yang dimiliki, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya berupa dana yang cukup akan dapat mendukung pelaksaan program dan kegiatan oleh setiap Perangkat Daerah. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kehutanan tahun 2025 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.8. Analisa efisiensi sumberdaya berhubungan dengan Tabel 3.9 dimana satu Program/Kegiatan dapat menunjang beberapa sasaran dan indikator.

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif baik. Secara umum, realisasi anggaran pada hampir seluruh indikator kinerja berada di bawah pagu yang ditetapkan, sementara capaian kinerja sebagian besar telah mencapai lebih dari 90 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan output dan outcome yang diharapkan tanpa harus menyerap seluruh anggaran, sehingga prinsip efisiensi dan value for money telah diterapkan dalam pengelolaan sumber daya.

Pada tujuan Pengelolaan Hutan Secara Lestari, efisiensi penggunaan anggaran terlihat pada sasaran peningkatan produktivitas kawasan hutan dan pengurangan kerusakan hutan. Capaian pembayaran PNBP serta pelaksanaan patroli pengamanan hutan dan mangrove berada pada kategori cukup efisien, yang menunjukkan bahwa kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara optimal dengan pengendalian biaya yang baik. Sementara itu, kegiatan rehabilitasi dan penanaman lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, menandakan bahwa intervensi rehabilitasi yang dilakukan telah tepat sasaran dan mampu memberikan dampak ekologis yang signifikan dengan pemanfaatan anggaran yang relatif hemat.

Efisiensi yang menonjol juga terlihat pada sasaran peningkatan usaha ekonomi perhutanan sosial dan penguatan kelembagaan kelompok tani hutan. Meskipun capaian indikator belum sepenuhnya maksimal, nilai efisiensi berada pada kategori sangat efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pendampingan,

kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta pemberdayaan masyarakat mampu menghasilkan kinerja yang berarti dengan keterbatasan anggaran, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif.

Pada tujuan Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan, pengelolaan sumber daya juga menunjukkan kinerja yang efisien. Capaian indikator tutupan lahan, pengendalian deforestasi, kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, serta indeks pengelolaan keanekaragaman hayati berada pada kategori efisien hingga cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan mampu mendukung pencapaian outcome strategis berupa terjaganya fungsi hutan dan meningkatnya peran sektor kehutanan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan telah berjalan secara optimal dan proporsional antara besaran anggaran dengan capaian kinerja. Efisiensi tertinggi dicapai pada kegiatan rehabilitasi lahan dan pemberdayaan masyarakat, sementara kegiatan pelayanan dan tata kelola organisasi menunjukkan efisiensi yang stabil. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya dapat dinilai telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif serta berkelanjutan, dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		
							EFISIENSI (%)	NILAI EFISIENSI (%)	KATEGORI
1	**2**	**3**		4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rp)	5.897.020.000	5.735.995.610	97,27	2,73	56,83	Cukup Efisien
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	2.101.396.000	2.056.865.108	97,88	2,12	55,30	Cukup Efisien
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)						
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	1.525.922.500	1.304.488.265	85,49	14,51	86,28	Sangat Efisien
		1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	900.000.000	878.758.340	97,64	2,36	55,90	Cukup Efisien
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	2.549.543.300	1.858.180.986	72,88	27,12	117,79	Sangat Efisien
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	58.796.152.406	54.722.348.316	93,07	6,93	67,32	Efisien
Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		**2**	**Persentase tutupan lahan (%)**	72.218.050.306	66.518.299.973	92,11	7,89	69,73	Efisien
	Meningkatnya Kontribusi Sektor	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5.897.020.000	5.735.995.610	97,27	2,73	56,83	Cukup Efisien

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		
							EFISIENSI (%)	NILAI EFISIENSI (%)	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)						
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	2.549.543.300	1.858.180.986	73	27	118	Sangat Efisien
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)						
		2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)						
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	72.218.050.306	66.518.299.973	92,11	7,89	69,73	Efisien
		2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	70.200.000	65.330.539	93	7	67	Efisien
		2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)						
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	2.425.922.500	2.183.246.605	90,00	10,00	75,01	Sangat Efisien
		2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)						
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	58.796.152.406	54.722.348.316	93,07	6,93	67,32	Efisien
		2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)						

Pada tataran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang baik dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Dari total anggaran sebesar Rp72.218.050.306,00, realisasi mencapai Rp66.518.299.973,00 atau 92,11 persen, dengan tingkat efisiensi sebesar 7,89 persen dan nilai efisiensi 69,73 persen yang masuk dalam kategori Efisien. Capaian ini mengindikasikan bahwa sasaran dan indikator kinerja dapat diraih secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang terukur dan terkendali.

Program Pengelolaan Hutan sebagai program utama menunjukkan kinerja efisiensi yang Sangat Efisien, di mana berbagai kegiatan strategis seperti perencanaan KPH, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pembinaan pemanfaatan hasil hutan mampu mencapai bahkan melampaui target indikator kinerja dengan realisasi anggaran di bawah pagu. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome), sekaligus mendukung keberlanjutan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan.

Program pendukung lainnya, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan, serta Program Pengelolaan DAS, secara umum berada pada kategori Efisien hingga Sangat Efisien. Efisiensi ini menunjukkan bahwa belanja administrasi, pemberdayaan masyarakat, konservasi ekosistem, dan pengelolaan DAS telah dilaksanakan secara proporsional dan sinergis dalam mendukung tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penggunaan sumber daya yang efisien tidak hanya menjaga akuntabilitas anggaran, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan sesuai visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Apabila melihat dari program dan kegiatan kehutanan yang telah dilaksanakan Dins Kehutanan, keberhasilan pencapaian IKU/IKK pada sesuai perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan efektif dan saling mendukung. Tingginya realisasi pembayaran PNBP sektor kehutanan menjadi bukti bahwa pengelolaan hutan produksi dilakukan secara terencana, legal, dan berkelanjutan. Keberhasilan ini ditunjang oleh Program Pengelolaan Hutan melalui kegiatan pembinaan PBPH dalam pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung, pembinaan/pengawasan PBPHH, pelaksanaan rencana tata hutan KPH, dan penyusunan rencana pengelolaan KPH (RPHJP dan RPHJPd) yang menjadi dasar seluruh pengelolaan hutan pada masing-masing wilayah KPH. Capaian tinggi pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan hutan telah berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas kawasan hutan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian.

Upaya mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam, dan ekosistemnya menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan, tercermin dari tingginya capaian patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove serta luas kawasan yang dilakukan pencegahan karhutla. Keberhasilan indikator tersebut ditunjang oleh kegiatan pencegahan dan pemberantasan kerusakan kawasan hutan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting, serta koordinasi dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antara program pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati telah memperkuat fungsi perlindungan hutan melalui peningkatan pengawasan, kesiapsiagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Dalam rangka pemulihan fungsi ekologis hutan dan lahan, capaian indikator rehabilitasi lahan kritis dan rehabilitasi kawasan hutan menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, penyediaan perbenihan tanaman hutan, serta pengelolaan daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. Integrasi Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan DAS memastikan bahwa rehabilitasi dilakukan secara terarah, berbasis lanskap, dan berkelanjutan, sehingga diharapkan

dapat menurunkan tingkat degradasi lahan, menurunkan luasan lahan kritis, sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat tercermin dari meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelompok perhutanan sosial, kelompok tani hutan (KTH), serta kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Capaian indikator ini ditunjang oleh Program Diklat, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelembagaan. Pendampingan yang dilakukan secara konsisten telah meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengelola usaha kehutanan secara produktif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pendampingan secara produktif dilakukan untuk penguatan kelembagaan KUPS melalui memberian bantuan alat ekonomi produktif. Diharapkan KUPS dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun demikian, capaian akses legal perhutanan sosial yang belum optimal menunjukkan bahwa keberhasilan program masih perlu didukung oleh percepatan proses perizinan di tingkat pusat.

Selanjutnya, pencapaian tujuan Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan yang digambarkan IKU persentase tutupan lahan berhutan wilayah Sumatera Selatan baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar untuk menilai kualitas daya dukung lingkungan terhadap kehidupan merupakan hasil dari keterpaduan antara program pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati, pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB, pengendalian deforestasi, peningkatan indeks keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi kawasan sempadan sungai menunjukkan bahwa pengelolaan hutan lestari telah memberikan manfaat. Ke depan, **penguatan tata kelola, pemutakhiran data berbasis spasial, dan pengembangan kegiatan baru yang berbasis sains menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja** tersebut.

.Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2		5	6		7	8	9
I. Pengelolaan Hutan Secara Lestari								
Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	141,94	Program Pengelolaan Hutan				
				1	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase	250	Menunjang
				2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase	100	Menunjang
				3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase	400	Menunjang
				4	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m3/Tahun	Persentase	120	Menunjang
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	422,95	Program Pengelolaan Hutan				
					Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase	126,5	Menunjang
				Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya				
					Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase	100	Menunjang
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	236,61	Program Pengelolaan Hutan				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase	100	Menunjang
Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	5124,4	Program Pengelolaan Hutan				
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase	52,7	Menunjang
					Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase	150	Menunjang
				Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)				

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2		5	6		7	8	9
					Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase	100	Menunjang
	1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	121,428571	Program Pengelolaan Hutan				
					Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Persentase	157,33	Menunjang
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	119,43	Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan				
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase	248	Menunjang
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	93,07	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				1	Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	Menunjang
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	89,85	Menunjang
				3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100	Menunjang
				4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	Menunjang
				5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	Menunjang
				6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	Menunjang
				7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	Menunjang
				8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2		5	6	7	8	9
II. Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan	**2**	**Persentase tutupan lahan (%)**	**100,00**	1. Pengelolaan Hutan, 2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das), 4. Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, 5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Data 2025 belum rilis, sehingga masih menggunakan data tahun sebelumnya
Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	364,00	Program Pengelolaan Hutan	Persentase	217,3	Menunjang
	2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	238,65	Program Pengelolaan Hutan	Persentase	217,3	Menunjang
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	213,67	Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase	248	Menunjang
Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	154,33	Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase	248	Menunjang
	2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	75,09	Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase	248	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2		5	6	7	8	9
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	190,65	1. Pengelolaan Hutan, 2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das), 4. Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, 5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase		Menunjang, namun masih perlu kegiatan baru interpretasi peta tutupan lahan dari citra terbaru
	2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	119,89	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase	**100**	Menunjang, namun masih perlu kegiatan baru pembinaan pengelolaan kehati yang dilakukan oleh Perizinan Berusaha
	2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	100,00	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase	100	Menunjang, namun masih perlu kegiatan baru inventarisasi dan identifikasi kehati di HP dan HL
Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	338,46	1. Pengelolaan Hutan 2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase	100,1	Menunjang
	2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	83,93	1. Pengelolaan Hutan 2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase	100,1	Menunjang
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	93,07	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	98,7	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2		5	6	7	8	9
	2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	94,96	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	98,7	Menunjang

8. Analisis Pengarusutamaan Gender

Kebijakan Nasional terkait strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pelaksanaan PUG di Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. PUG dalam pembangunan kehutanan didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah.

Proporsi gender jumlah ASN di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah pegawai laki–laki 346 orang (71%) dan pegawai perempuan 142 orang (21%). Kondisi dipahami mengingat karakteristik sektor kehutanan yang banyak menuntut pekerjaan teknis lapangan. Namun, tetap perlu dorongan peningkatan peran perempuan khususnya pada bidang administrasi, perencanaan, pengendalian dan pengelolaan program yang memerlukan perspektif gender.

Dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelenggaraan PUG (revitalisasi PUG) melalui Pelembagaan PUG dan Penyelenggaraan PUG, yang telah dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

Tabel 3.9 Pelembagaan dan Penyelenggaraan PUG

Pelembagaan PUG (3 Prasyarat) :	Penyelenggaraan PUG (7 Prasyarat) :
1. Kebijakan 2. SDM dan Internalisasi 3. Data Terpilah Gender	1. PUG dalam Perencanaan 2. PUG dalam Penganggaran 3. PUG dalam Pelaksanaan 4. PUG dalam Pemantauan 5. PUG dalam Evaluasi 6. PUG dalam Pengawasan 7. PUG dalam Pelaporan
1. Melakukan Internalisasi PUG di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD KPH melalui	1. Melakukan pendampingan dan Menyusun Gender *Analysis Pathway* (GAP) dan Gender *Budget Statement* (GBS) untuk 5 Subkegiatan :

Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.2/2271/DISHUT.I/2025 2. Menetapkan *Focal Point* Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor 207/KPTS/IV/2025 yang beranggotakan 16 orang, terdiri dari 7 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. 3. Menyusun Data Terpilah Gender; Proporsi gender jumlah ASN di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah pegawai laki–laki 346 orang (71%) dan pegawai perempuan 142 orang (29%).	▪ Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi, ▪ Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara ▪ Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha Atau Kerjasama Pemanfaatan Di Kawasan Hutan Produksi ▪ Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan ▪ Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 2. Integrasi Gender dalam Rensta Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029 3. Melakukan Evaluasi Mandiri Pelaksanaan PUG Tahun 2025

Untuk Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Tahun 2025, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah mengintegrasikan kegiatan pembangunan kehutanan dengan pelibatan perempuan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Tahun 2025

Nama Subkegiatan	**Nama Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Persentase keikutsertaan Laki-laki dan perempuan**		**Penjelasan Kegiatan**
			L (%)	**P(%)**	
1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1. Kegiatan sosialisasi interaksi negatif manusia dan satwa liar	Kelurahan Sidorejo, Kec. Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam	75	25	Meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan terkait konservati kehati dan mitigasi interaski negative manusia-satwa

Nama Subkegiatan	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Persentase keikutsertaan Laki-laki dan perempuan		Penjelasan Kegiatan
			L (%)	P(%)	
		Desa Semangus Kec. Talang Ubi, Kab. Pali	65	35	
	2. Pelatihan Menembak		95	15	
	3. Sosialisasi Pencegahan Karhutlah	Des Sindang Laya Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas	83	17	
		Desa Suban Jeriji Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim	93	7	
		Desa Muara Merang KEc bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin	70	30	
		Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab Pali	70	30	
1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Ikut berpartisipasi aktif dalam Forum Perempuan Pengelola dan Penjaga Hutan di Provinsi Sumatera Selatan dalam Talkshow dengan tema Perempuan dan Generasi Muda Penjaga Hutan : Menguatkan Kelembagaan, Kepemimpinan, dan Sinergi Multipihak untuk Perhutanan Sosial yang Inklusif dan Responsif Gender di Sumatera Selatan	Palembang	40	60	

Tabel 3.11 Kegiatan Responsif Gender yang dilaksanakan oleh UPTD KPH

No	UPTD KPH	Kegiatan	Lokasi	Persentase keikutsertaan laki-laki dan perempuan	
				Laki-laki (%)	Perempuan (%)
1	UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis bekerja sama dengan ICRAF dalam proyek *Land For Life*	1. Kegiatan pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan (terutama perempuan dan anak-anak) baik didalam dan disekitar kawasan hutan 2. Pembibitan tanaman berbasis pepohonan (buah buahan sih, ex duren, alpukat, lengkeng, mangga) dan dilakukan pelatihan perbanyakan tanaman secara vegetatif untuk menghasilkan tanaman unggul (cangkok, stek, okulasi, sambung) 3. Kebun dapur komunal (untuk belajar bagaimana membuat dan mengelola kebun dapur, biasanya tanaman sayuran, yang harapannya bisa memenuhi kebutuhan dapur) 4. Pemanfaatan lahan secara optimal dan cerdas ilm bersama petani pelopor cerdas iklim dari tapak percontohan tiap desa (pendampingan praktik pertanian ramah lingkungan tanpa pupuk kimia, strategi pemasaran hasil pertanian, pengelolaan lahan berkelanjutan)	Desa Mangsang, Kepayang, Suka Damai, Mendis Jaya, Muara Medak, dan Desa Muara Merang (SL 4 KPH Lalan Mendis).	60	40

No	UPTD KPH	Kegiatan	Lokasi	Persentase keikutsertaan laki-laki dan perempuan	
				Laki-laki (%)	Perempuan (%)
2	UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding	Pendampingan Kelompok Usaha Wanita Bintang Ratu Produksi Kukis Buah Nipah dan Abon Bandeng	Kab OKI	20	80
3	UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji	Pendampingan KUPS Sejahtera Bunda membuat produk olahan siap jual yaitu Tiwul	KTH Jaya Makmur Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir		100
4	UPTD KPH VIII Semendo	Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Lahan melalui Program Perhutanan Sosial dan Meningkatkan Kewirausahaan Sosial pada Komoditas Wanatani berkelanjutan melalui kerjasama dengan NGO Pilar Nusantara berupa Pendampingan dan pembentukan KUPS Perempuan dan Penjaga Hutan Wanita (*Woman Forest Defender*) dengan rincian kelompok sebagai berikut : 1. KUPS Perempuan Pandan Indah, 2. KUPS Perempuan Muara Jaya, 3. KUPS Perempuan Beringin Jaya, 4. KUPS Perempuan Anak Belai, 5. KUPS Perempuan Sepakat, 6. KUPS Perempuan Sepakat Indah, 7. KUPS Perempuan Talang Muare, 8. KUPS Perempuan Talang Muare, 9. KUPS Perempuan Jaya Bersama, 10. KUPS Perempuan Talang Kawe, 11. Penjaga Hutan Wanita (Woman Forest Defender)	Wilayah KPH Wilayah VIII Semendo	10	90

No	UPTD KPH	Kegiatan	Lokasi	Persentase keikutsertaan laki-laki dan perempuan	
				Laki-laki (%)	Perempuan (%)
		Hutan Desa Kota Padang, 12. Penjaga Hutan Wanita (*Woman Forest Defender*) Hutan Desa Tanjung Agung, 13. Penjaga Hutan Wanita (*Woman Forest Defender*) Hutan Desa Adat Aek Bigha Puyang Sure, 14. Penjaga Hutan Wanita (*Woman Forest Defender*) Hutan Desa Tenam Bungkuk			
5	UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah	1. Pelatihan pembuatan sabun berbahan dasar kopi, 2. Pelatihan budidaya kambing PE, 3. Sosialisasi dan Pelatihan DWP Cabang UPTD KPH Wil. XI Kikim Pasemah	Kab. Lahat	40	60

Integrasi kegiatan responsif gender tahun 2025 sebagaimana gambar dan penjelasan di bawah ini :

Gambar 3.1 Partisipasi dalam Talkshow dengan tema Perempuan dan Generasi Muda Penjaga Hutan pada Seremonial kegiatan HMPI di Desa Batumarta X Pelatihan dan Pembuatan Pakan Ternak (Magot)

Gambar 3.2 Sosialisasi Pencegahan Karhutlah UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis

Gambar 3.3 Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) di UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji

Gambar 3.4 Kegiatan Pembelajaran Pertanian Cerdas Iklim dan contoh Kebun Belajar di UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis

Gambar 3.5 Kegiatan Patroli Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat UPTD KPH

Gambar 3.6 Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan di UPTD KPH Wilayah V Lempuing-Mesuji Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI

Gambar 3.7 Pendampingan dan pembentukan KUPS Perempuan dan Penjaga Hutan Wanita (*Woman Forest Defender*) di UPTD KPH Wilayah VIII Semendo

B. Realisasi Anggaran

Dari realisasi anggaran Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan selaras dengan target kinerja yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dari total pagu anggaran sebesar Rp72.218.050.306,00, telah direalisasikan sebesar Rp66.518.299.973,00 atau mencapai 92,11 persen. Tingkat penyerapan ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta output dan outcome yang telah direncanakan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, alokasi anggaran sebesar Rp58.796.152.406,00 terealisasi Rp54.722.348.316,00 atau 93,07 persen. Realisasi ini mendukung kelancaran fungsi manajerial dan tata kelola pemerintahan, terutama melalui administrasi keuangan, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, administrasi umum, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan. Capaian yang tinggi pada komponen gaji dan tunjangan ASN serta pelaporan keuangan menunjukkan konsistensi dalam menjaga stabilitas operasional organisasi. Sementara itu, terdapat beberapa sub kegiatan dengan realisasi rendah, seperti pendidikan dan pelatihan pegawai serta pengelolaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan dan kebijakan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Program Pengelolaan Hutan memiliki pagu anggaran Rp10.774.832.000,00 dengan realisasi Rp9.845.446.245,00 atau 91,37 persen. Anggaran ini secara langsung digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja sektor kehutanan, khususnya dalam pengelolaan KPH, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, pemanfaatan hasil hutan, serta perbenihan tanaman hutan. Tingginya realisasi pada kegiatan koordinasi perubahan fungsi kawasan hutan, perlindungan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan fokus anggaran pada kegiatan strategis yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan sumber daya hutan. Adapun realisasi yang relatif rendah pada beberapa sub kegiatan rehabilitasi fisik, seperti pembangunan sumur resapan, gully plug, dan dam, dipengaruhi oleh kendala teknis dan penyesuaian pelaksanaan di lapangan.

Pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, anggaran sebesar Rp70.200.000,00 direalisasikan Rp65.330.539,00 atau 93,06 persen. Realisasi ini mendukung penguatan kapasitas dan pemberdayaan

masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting, yang berkontribusi pada upaya konservasi berbasis masyarakat serta perlindungan kawasan penyangga ekosistem penting di tingkat provinsi.

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan memiliki pagu Rp2.549.543.300,00 dengan realisasi Rp1.858.180.986,00 atau 72,88 persen. Anggaran ini digunakan untuk peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan, penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, serta penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial. Meskipun secara umum mendukung pencapaian kinerja pemberdayaan masyarakat, realisasi yang belum optimal terutama pada kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh menunjukkan adanya penyesuaian metode pelaksanaan dan keterbatasan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Sementara itu, Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menunjukkan kinerja anggaran yang sangat baik dengan pagu Rp27.322.600,00 dan realisasi Rp26.993.887,00 atau 98,80 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk peningkatan koordinasi dan sinkronisasi optimalisasi fungsi serta daya dukung wilayah DAS, yang berperan penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya air dan keberlanjutan lingkungan.

Beberapa capaian realisasi keuangan sub kegiatan yang menunjang program cukup rendah disebabkan adanya kendala teknis atau pun tata waktu. Sub kegiatan yang capaian keuangannya cukup rendah dimaksud yaitu :

Tabel 3.12 Kendala Kegiatan Tahun 2025

No.	Program	Sub Kegiatan	Kendala
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daearah Provinsi	a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	a. Kegiatan Pengamanan BMD tahun 2025 difokuskan pada penertiban dan pengajuan penerbitan sertipikat tanah, b. Alokasi peserta Diklat Kepemimpinan dari LAN -RI dan BP2SDM belum ada c. Keterbatasan ketersediaan bahan bacaan penyuluh dan terkendala dalam proses tata waktu pengadaan

2	Pengelolaan Hutan	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan b. Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan c. Pembangunan Sumur Resapan d. Pembangunan Gully Plug e. Pembangunan Dam	a. Dokumen RPHJP telah selesai, namun terdapat 2 KPH dari 4 KPH target yang belum menyelesaikan ekspos di Kemenhut sebagai tahapan proses penetapan RPHJP. b. Keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga yang terlaksana hanya penanaman mangrove sedangkan pemeliharaan tidak terlaksana. c. Pembangunan sumur resapan, gully plug dan Dam penahan ditunda pembangunannya dikarenakan RKP DBH Sawit Perubahan Tahun 2025 belum dibahas oleh Kemenkeu
3.	Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terdapat kegiatan pembangunan unit percontohan penyuluh kehutanan yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan tata waktu.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran telah digunakan secara proporsional dan terarah untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja. Tingkat penyerapan yang tinggi mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas belanja agar semakin berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan sektor kehutanan di tahun berikutnya.

C. Data Dukung Pencapaian Kinerja

(1) Analisis capaian kinerja per sasaran strategis yang ditetapkan dalan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1. Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya produktivitas kawasan hutan dapat dicapai dengan jumlah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai kewajibannya dapat dicapai dengan didukung oleh program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2025 yaitu Program Pengelolaan Hutan.

Total pagu untuk mendukung sasaran 1 sebesar Rp. 5.897.020.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.735.995.610,- atau 89,77%. Adapun capaian kinerja indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)	77.484.874.860	109.981.335.177	141,94

Sumber Data : Pencapaian Kinerja Dishut Tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya produktivitas kawasan hutan dengan indikator jumlah pembayaran PNBP sesuai kewajibannya telah melebihi target indikator tahun 2025.

IKU 1.1. Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)

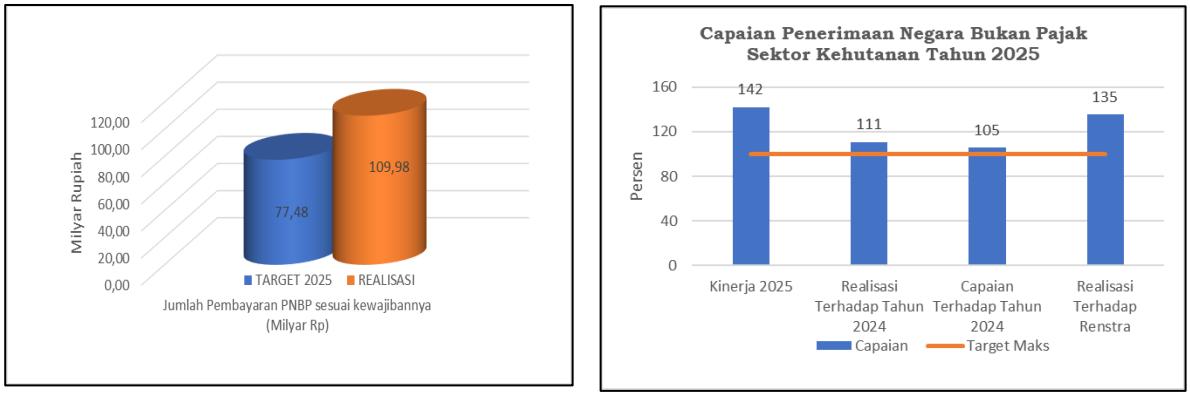

Gambar 3.8 Capaian PNBP Sektor Kehutanan Tahun 2025

Berdasarkan diagram capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan tahun 2025, kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui target yang ditetapkan. Secara persentase, capaian kinerja tahun 2025 mencapai 142%, meningkat dibanding realisasi terhadap tahun 2024 sebesar 111% serta capaian terhadap tahun 2024 sebesar 105%, dan juga melampaui target Renstra dengan realisasi sebesar 135%. Sejalan dengan hal tersebut, dari sisi nominal penerimaan, target PNBP tahun 2025 sebesar Rp77,48 miliar berhasil direalisasikan sebesar Rp109,98 miliar, atau jauh di atas target yang ditetapkan.

Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban PNBP, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

hutan, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara di sektor kehutanan.

Data Dukung Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)

Tabel 3.14 Realisasi pembayaran PNBP Tahun 2025

NO	NO KODE	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PNBP JANUARI-NOVEMBER TAHUN 2025				TOTAL PNBP TH. 2025 (JANUARI-NOVEMBER)	KETERANGAN
			PSDH	DR		IUPH		
			(Rp)	(USD)	(RP)	(RP)	(RP)	
1	85.01	MUSI BANYUASIN	23.153.806.229,00	-	1.249.570.115,00	-	24.403.606.344,00	
2	85.02	OGAN KOMERING ULU	476.814.484,00	-	99.340.808,00	-	576.855.284,00	
3	85.03	MUARA ENIM	5.151.673.535,00	936,20	141.998.912,10	-	5.293.672.447,10	
4	85.04	LAHAT	2.435.405.198,00	-	-	-	2.435.405.198,00	
5	85.05	MUSI RAWAS	5.397.783.211,00	-	270.948.616,00	-	5.668.731.828,00	
6	85.06	OGAN KOMERING ILIR	47.885.384.386,00	-	-	-	47.885.384.386,00	
7	85.07	KOTA PALEMBANG	-	-	-	-	-	
8	85.08	KOTA PRABUMULIH	-	-	-	-	-	
9	85.09	KOTA OGAN LINGGAU	-	-	-	-	-	
10	85.10	KOTA PAGAR ALAM	11.410.041,00	-	-	-	11.410.041,00	
11	85.11	BANYUASIN	4.856.897.752,00	-	-	-	4.856.897.752,00	
12	85.12	OGAN KOMERING ULU TIMUR	-	-	-	-	-	
13	85.13	OGAN KOMERING ULU SELATAN	841.300.226,00	-	4.274.376.198,00	-	5.115.676.424,00	
14	85.14	OGAN ILIR	-	-	-	-	-	
15	85.15	EMPAT LAWANG	-	-	-	-	-	
16	85.16	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	90.613.488,00	-	-	-	90.613.488,00	
17	85.17	MUSI RAWAS UTARA	26.556.046,00	-	89.430.418,00	-	96.392.456,00	
JUMLAH			89.540.074.571,00	936,20	6.205.271.057,10	0,00	95.751.945.628,10	

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya hutan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data PNBP yang disajikan merupakan akumulasi realisasi penerimaan selama periode Januari sampai dengan November 2025, yang bersumber dari Register Biro Keuangan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, total realisasi PNBP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan November 2025 mencapai Rp95.751.945.628,10, yang terdiri dari:

1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp89.546.674.571,00 serta USD 936,20;
2. Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp6.205.271.057,10;
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) sebesar Rp0,00.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PNBP masih didominasi oleh komponen PSDH, yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Kontribusi PNBP tidak berasal dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar antara lain: Kabupaten Musi Banyuasin;Kabupaten Ogan Komering Ilir;Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya belum mencatatkan realisasi PNBP pada periode pelaporan, yang disebabkan oleh tidak adanya aktivitas pemanfaatan hutan atau kegiatan perizinan yang belum memasuki tahap kewajiban pembayaran.

Tabel 3.15 Realisasi pembayaran PNBP Perhutanan Sosial Tahun 2025

NO	UPTD KPH	REALISASI PNBP JANUARI-NOVEMBER TAHUN 2025			TOTAL PNBP TH. 2025 (JANUARI-NOVEMBER)	KETERANGAN
		PSDH	DR	IIUPH		
		(Rp)	(RP)	(RP)	(RP)	
1	UPTD KPH WILAYAH I MERANTI	-	-	-	-	-
2	UPTD KPH WILAYAH II LALAN MENDIS	-	-	-	-	-
3	UPTD KPH WILAYAH III PALEMBANG-BANYUASIN	-	-	-	-	-
4	UPTD KPH WILAYAH IV SUNGAI LUMPUR-RIDING	-	-	-	-	-
5	UPTD KPH WILAYAH V LEMPUING-MESUJI	70.312.250,00	-	-	70.312.250,00	-
6	UPTD KPH WILAYAH VI BUKIT NANTI - MARTAPURA	-	-	-	-	-
7	UPTD KPH WILAYAH VII MEKAKAU SAKA	16.949.940,00	-	-	16.949.940,00	-
8	UPTD KPH WILAYAH VIII SEMENDO	-	-	-	-	-
9	UPTD KPH WILAYAH IX SUBAN JERIJI	-	-	-	-	-
10	UPTD KPH WILAYAH X DEMPO	18.910.188,00	-	-	18.910.188,00	-
11	UPTD KPH WILAYAH XI KIKIM PASEMAH	3.604.755,00	-	-	3.604.755,00	-
12	UPTD KPH WILAYAH XII BENAKAT	-	-	-	-	-
13	UPTD KPH WILAYAH XIII LAKITAN-BUKIT COGONG	-	-	-	-	-
14	UPTD KPH WILAYAH XIV RAWAS	-	-	-	-	-
J U M L A H		**109.777.133,00**	**0,00**	**0,00**	**109.777.133,00**	

Realisasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perhutanan Sosial merupakan penerimaan negara yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan hutan oleh kelompok Perhutanan Sosial dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Data yang disajikan merupakan realisasi pembayaran PNBP Perhutanan Sosial Tahun 2025 berdasarkan KPH di Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam tabel data dukung.

Gambar 3.9 Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kawasan hutan pada PBPH

Sasaran 2. Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya

Tolak ukur capaian sasaran mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya diselesaikan sebagai berikut :

1. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi)
2. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)

Total pagu untuk mendukung sasaran 2 sebesar Rp. 2.101.396.000,- dengan realisasi keuangan Rp.2.056.865.108,- atau 95,35% dan realisasi fisik 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.16 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	1. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi)	61	261	427,87
		2. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19	28,84	236,61

Sasaran Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya dapat diselesaikan telah mencapai target indikator tahun 2025. Target Rasio Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi), Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%) serta, Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi) telah sesuai dan mencapai target yang ditetapkan.

IKU 2. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi)

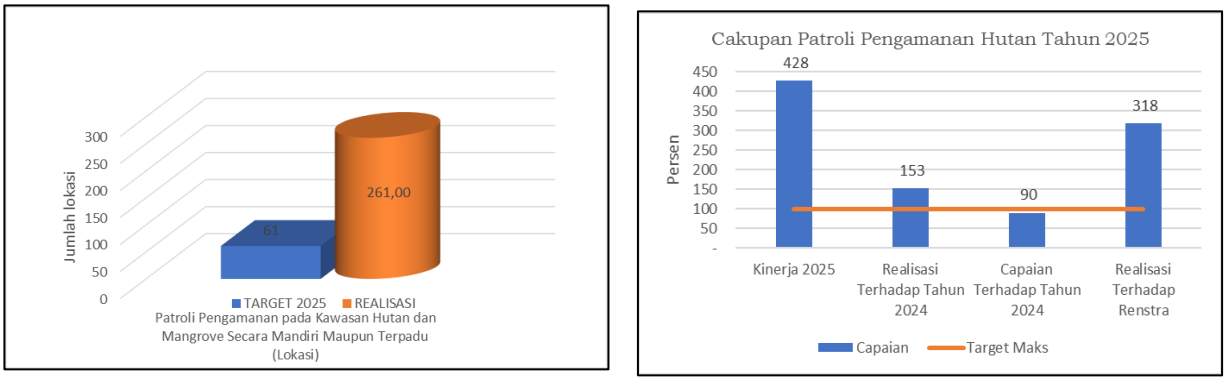

Gambar 3.10 Capaian Patroli Pengamanan Hutan dan Mangrove Tahun 2025

Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2025. Berdasarkan tabel capaian, total kinerja tahun 2025 mencapai 428 lokasi patroli, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 153 lokasi, dengan capaian terhadap tahun 2024 sebesar 90%. Selain itu, realisasi kegiatan patroli juga telah melampaui target Renstra, tercermin dari realisasi terhadap Renstra sebesar 318 lokasi, yang menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan upaya pengamanan kawasan hutan dan mangrove.

Selanjutnya, berdasarkan tabel target dan realisasi tahun 2025, kegiatan patroli memiliki target 61 lokasi, namun realisasi mencapai 261 lokasi, atau lebih dari empat kali lipat target yang ditetapkan. Capaian ini menggambarkan tingginya intensitas dan komitmen pengamanan kawasan hutan dan mangrove, baik melalui patroli mandiri maupun terpadu, sebagai respons terhadap kebutuhan pengendalian gangguan keamanan hutan dan upaya perlindungan ekosistem secara berkelanjutan.

Data Dukung Capaian Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)

Aksi yang dilakukan untuk mencapai sasaran 2 Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya yaitu dengan Melakukan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan, diantaranya dilakukan oleh personil Polisi Hutan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dan personil di 14 KPH di Sumatera Selatan.

Upaya mendukung IKU Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi) antara lain :

1. Adanya Pegawai yang bertugas melakukan patroli dan sosialisasi di wilayah UPTD KPH wilayah I – XIV sangat berperan dalam upaya melakukan patroli pada kawasan hutan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan.
2. Adanya pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan yang bertugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi Kehutanan melalui kegiatan Pre Emtif, Preventif, Represif dan Yustisif.

Tabel 3.17 Pelaksanaan patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan

No.	Nama KPH		Jumlah Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan		Lokasi Patroli Kawasan Hutan
1	2		3		4
1	UPTD KPH Wilayah I	Meranti	20	Lokasi	Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Musi Rawas Utara
2	UPTD KPH Wilayah II	Lalan Mendis	19	Lokasi	Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin

No.	Nama KPH		Jumlah Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan		Lokasi Patroli Kawasan Hutan
1	2		3		4
3	UPTD KPH Wilayah III	Palembang-Banyuasin	12	Lokasi	Kab. Banyuasin, Kab. Dan Musi Banyuasin,
4	UPTD KPH Wilayah IV	Sungai Lumpur	8	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ilir
5	UPTD KPH Wilayah V	Lempuing-Mesuji	7	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ilir
6	UPTD KPH Wilayah VI	Bukit Nanti Martapura	27	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ulu
7	UPTD KPH Wilayah VII	Mekakau Saka	25	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
8	UPTD KPH Wilayah VIII	Semendo	16	Lokasi	Kab. Muara Enim dan Kab. Lahat
9	UPTD KPH Wilayah IX	Suban Jeriji	28	Lokasi	Kab. Muara Enim dan Prabumulih
10	UPTD KPH Wilayah X	Dempo	18	Lokasi	Kab. Pagaralam
11	UPTD KPH Wilayah XI	Kikim Pasemah	16	Lokasi	Kab. Lahat
12	UPTD KPH Wilayah XII	Benakat	10	Lokasi	Kab. Muara Enim
13	UPTD KPH Wilayah XIII	Lakitan Bukit Cogong	46	Lokasi	Kota Lubuk Linggau
14	UPTD KPH Wilayah XIV	Rawas	6	Lokasi	Kab. Musi Rawas Utara

3. Selain patroli (preventif), Dinas Kehutanan melaksanakan kegiatan pembatasan kerusakan Kawasan hutan melalui penindakan dan atau penanganan konfilik kepentingan serta tindak pelanggaran terhadap kawasan hutan atas laporan dari masyarakat. Kegiatan penindakan bertujuan agar menimbulkan efek jera masyarakat. Kegiatan ini diantaranya :

   a) Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai konflik pelanggaran batas Kawasan hutan di Hutan Produksi (HP) Terusan Sialang UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji.

   b) Menindaklanjuti laporan terkait Pengamanan Hutan dan Lahan serta Pengumpulan Data dan Informasi terkait Aktivitas Ilegal Masyarakat dalam Areal Izin PBPH PT. Restorasi Hutan Sumatera di Desa Kepayang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Gambar 3.11 Pengamanan Hutan dan Lahan

4. Kegiatan Sosialisasi konflik manusia dan satwa liar di Dusun 9 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis dan Desa Tanjung Agung Kec. Semendo Darat Ulu Kab.Muara Enim wilayah UPTD Wilayah VIII Semendo dengan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, BKSDA Sumsel dan KPH setempat. Mitigasi ini meminimalkan korban akibat serangan satwa liar yang ada di wilayah ini seperti buaya senyulong dan harimau.
5. Kegiatan koordinasi mitigasi konflik gajah di wilayah kerja UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding di Kayu Agung. Memonitor aksi mitigasi konflik gajah bersama Pemeintah Kabupaten, dan BKSDA Sumsel seperti : pembangunan posko oleh BKSDA dan PT. Sinar Mas di Desa Banyu Biru Kecamatan Air Sugihan Kab. OKI, mendatangkan 2 gajah jinak untuk membantu menjinakkan gajah liar, dan Pembangunan Barier fisik maupun vegetasi.

Gambar 3.12 Koordinasi dan Sosialisasi mitigasi konflik manusia dan satwa liar dengan Pemerintah Kabupaten, BKSDA Sumsel dan PBPH

6. Koordinasi dalam rangka menyusun rencana mitigasi interaksi negatif manusia dan gajah di Desa SP V Tri Anggunjaya SP 5 HTI Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, UPTD KPH Wilayah XII Benakat. Mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kantong satwa liar agar melibatkan para pihak yang beraktifitas (PPKH, PBPH, Perkebunan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat). Mendesak para pihak untuk memfasilitasi pembentukan masyarakat desa mandiri pada desa-desa yang berada di dalam/sekitar home range gajah.

IKU 3. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)

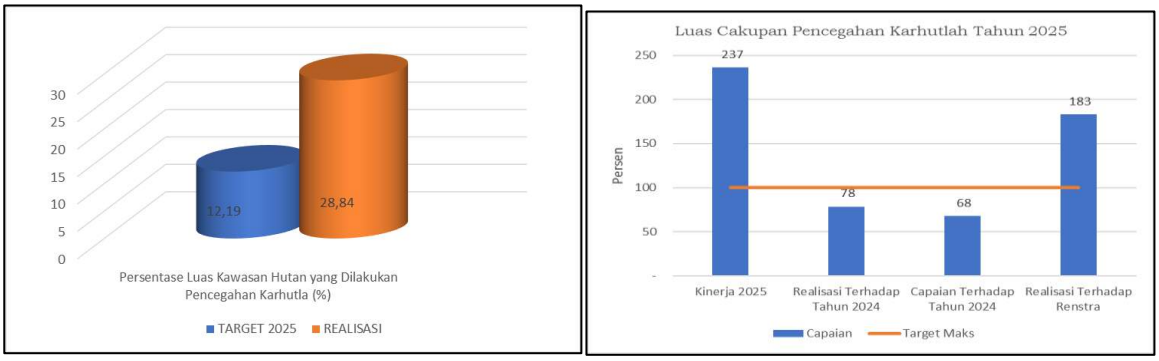

Gambar 3.13 Luas Cakupan Pencegahan Karhutlah Tahun 2025

Persentase luas kawasan hutan yang dilakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat positif. Target tahun 2025 sebesar 12,19% berhasil terlampaui signifikan dengan realisasi mencapai 28,84%, yang mencerminkan meningkatnya cakupan wilayah hutan yang mendapatkan upaya pencegahan karhutla secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan tabel capaian, kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 237, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 78, dengan capaian terhadap tahun 2024 sebesar 68%. Selain itu, realisasi kegiatan pencegahan karhutla juga menunjukkan kemajuan yang kuat terhadap perencanaan jangka menengah, ditunjukkan oleh realisasi terhadap Renstra sebesar 183. Capaian ini menggambarkan penguatan upaya mitigasi risiko kebakaran melalui pencegahan dini, peningkatan kesiapsiagaan, serta perluasan intervensi pada kawasan hutan rawan karhutla.

Data Dukung Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)

Tabel 3.18 Realisasi kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengamanan hutan (Untuk pengisian Aplikasi Aksi pembangunan Rendah karbon Bapennas)

Nama Kegiatan	Tanggal	Luas (Ha)	Lokasi Kegiatan			Koordinat		Fungsi Kawasan (APL, HL, HP, dsb)	Tutupan Lahan	Jenis Tanah (Mineral / Gambut)
			Kabupaten	Kecamatan	Desa	LAT	LONG			
Patroli	10 s.d 12 Sept 2025	500	Ogan Komering Ilir	Pampangan	Jungkal	-3.219	105.0222	APL	Perkebunan	Gambut

Nama Kegiatan	Tanggal	Luas (Ha)	Lokasi Kegiatan			Koordinat		Fungsi Kawasan (APL, HL, HP, dsb)	Tutupan Lahan	Jenis Tanah (Mineral / Gambut)
			Kabupaten	Kecamatan	Desa	LAT	LONG			
Patroli	02 s.d 04 September 2025	500	Ogan Ilir	Indralaya Utara	Pulau Semambu	-3.168	104.6863	APL	Perkebunan Pertanaian	Mineral
Patroli	13 s.d 15 Agustus 2025	500	Banyuasin	Rambutan	Rambutan	-3.125	104.9107	APL	Perkebunan Pertanaian	Mineral
Patroli	08 s.d 10 Oktober 2025	500	Banyuasin	Rambutan	Sungai Pinang	-3.219	105.0222	APL	Perkebunan Pertanaian	Mineral
Patroli	24 s.d 26 November 2025	500	Ogan Ilir	Indralaya Utara	Sungai Rambutan	-3.121	104.6645	APL	Perkebunan Pertanaian	Mineral
Patroli	08 s.d 10 Oktober 2025	500	Ogan Komering Ilir	Sirah Pulau Padang	Sirah Pulau Padang	48645	9638438	APL	Perkebunan Pertanaian	Gambut
Patroli	01 s.d 03 Oktober 2025	500	Banyuasin	Tanjung Lago	Tanjung Lago	-2.730	104.70816	APL	Perkebunan Pertanaian	Gambut
Patroli	29 s.d 31 Oktober 2025	500	Muara Enim	Rambang Niru	Suban Jeriji	-3.564	103.2464	APL	Perkebunan	Mineral
Patroli	01 s.d 03 Oktober 2025	500	Ogan Ilir	Pemulutan Barat	Arisan Jaya	-3.168	104.6863	APL	Perkebunan Pertanian	Mineral
Patroli	17 s.d 19 September 2025	500	Banyuasin	Muara Padang	Karang Anyar	-2.700	105.0683	APL	Perkebunan Pertanian	Mineral

Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Upaya mendukung IKU Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla antara lain :

1) Personil Pegawai KPH bertugas diantaranya melakukan patroli pengendalian kebakaran hutan di wilayah UPTD KPH wilayah I – XIV melalui ground check hotspot, sekaligus sosialisasi kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan.
2) Pemantauan hotspot melalui Sistem Informasi SONGKET (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu), penyebaran informasi melalui media sosial (WA dan Email)

Gambar 3.14 Patroli Kebakaran dan Pengamanan Hutan

3) Pembinaan monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan pengendalian Karhutla dan lahan oleh Instansi Pemerintah ke 11 Perusahaan PBPH/HTI sektor kehutanan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang diperoleh mengetahui kesiapsiagaan perusahaan dalam rangka Pengendalian Karhutla, oganisasi brigdalkarhutla, SDM, Sarpras serta kegiatan yang dilakukan terkait perencanaan, pencegahan, pemadaman dan penanganan paska Karhutla.
4) Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh Instansi Pemerintah ke 13 lokasi Perusahaan PPKH Migas, Minerba dan Non tambang lainnya sektor kehutanan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang diperoleh Mengetahui kesiapsiagaan perusahaan dalam rangka Pengendalian Karhutla, oganisasi brigdalkarhutla, SDM, Sarpras serta kegiatan yang dilakukan terkait perencanaan, pencegahan, pemadaman dan penanganan paska Karhutla.

Gambar 3.15 Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada PBPH dan PPKH

5) Kegiatan dalam rangka pengukuran areal bekas terbakar kebakaran hutan dan lahan di 1 lokasi terindikasi bekas terbakar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Lokasi: PBPH PT. Tripupa Jaya
6) Penyusunan Buku Statistik Hotspot Tahun 2025, sehingga diperolehnya informasi dan data sebaran jumlah hotspot tiap kabupaten, jenis kawasan, jenis tanah, dan pemegang ijin pemanfaatan hutan.
7) Koordinasi dan konsultasi ke KLHK, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan terkait sinkronisasi data aplikasi SONGKET SUMSEL dengan data SIPONGI, dan wali data lainnya.

Sasaran 3. Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan

Tolak ukur capaian sasaran Mengurangi luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan, diselesaikan sebagai berikut :

1. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha).
2. Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%).

Tabel 3.19 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
III	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	512,44	5.124,40
		2.	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,17	121,43

IKU 4. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)

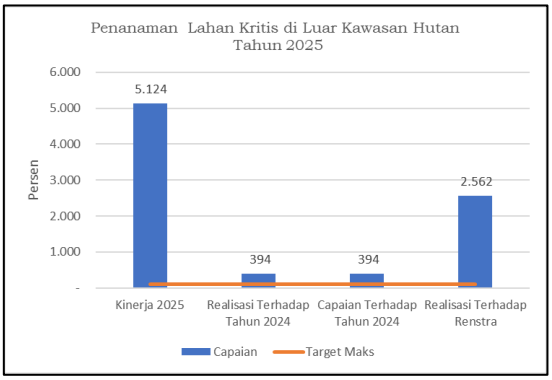

Gambar 3.16 Penanaman Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Tahun 2025

Kegiatan penanaman pada lahan kritis di luar kawasan hutan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Dari target tahun 2025 sebesar 10 hektare, realisasi mencapai 512,44 hektare, atau jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan meningkatnya komitmen dan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan penanaman di luar kawasan hutan.

Berdasarkan tabel capaian, kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 5.124, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 394, dengan capaian terhadap tahun 2024 sebesar 394%. Selain itu, realisasi kegiatan penanaman juga menunjukkan kontribusi yang kuat terhadap perencanaan jangka menengah, ditunjukkan oleh realisasi terhadap Renstra sebesar 2.562. Capaian ini menggambarkan keberhasilan sinergi program rehabilitasi lahan, dukungan lintas sektor, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan lingkungan dan peningkatan fungsi ekologis lahan kritis.

Data Dukung Capaian Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)

Sejalan dengan perkembangan waktu tekanan terhadap kawasan hutan semakin tinggi yang antara lain disebabkan oleh gangguan penebangan liar (Illegal Logging), perambahan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, kebakaran hutan. Selain itu dampak dari pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan teknik konservasi tanah dan air yang baik menyebabkan masih banyaknya lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan atas dasar Keputusan Dirjen PDASRH No: SK.49/PDASRH/PPPDAS/

DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, bahwa lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 seluas 707.169 Ha. Menurut pembagian kewenangan, rehabilitasi hutan seluas 472.519 Ha adalah kewenangan Pusat dan rehabilitasi lahan seluas 234.650 Ha kewenangan Daerah.

Tabel 3.20 Lahan Kritis dan Sangat Kritis Wilayah Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kekritisan Lahan						Jumlah Dalam dan Luar Kawasan Hutan (Ha)
		Dalam Kawasan Hutan (ha)			Luar Kawasan Hutan (ha)			
		Kritis	Sangat Kritis	Total	Kritis	Sangat Kritis	Total	
1	Banyuasin	9.967,04		9.967,04	22,15		22,15	9.989,19
2	Empat Lawang	11.907,93	37.405,88	49.313,81	17.847,73	19.078,37	36.926,11	86.239,92
3	Kota Lubuk Linggau	5.025,08	847,08	5.872,16	1.939,05	76,43	2.015,48	7.887,64
4	Kota Pagar Alam	1.357,98	5.591,01	6.948,99	1.342,25	7.487,75	8.830,00	15.778,98
5	Kota Palembang			-			-	-
6	Kota Prabumulih			-			-	-
7	Lahat	31.879,94	20.928,33	52.808,27	16.760,78	17.793,47	34.554,25	87.362,51
8	Muara Enim	16.852,78	19.986,74	36.839,52	21.452,98	9.476,24	30.929,22	67.768,74
9	Musi Banyuasin	100.749,40		100.749,40	3.930,13		3.930,13	104.679,53
10	Musi Rawas	32.738,60	4.048,49	36.787,09	5.403,61	460,12	5.863,73	42.650,82
11	Musi Rawas Utara	18.782,64	1.646,70	20.429,35	6.075,43	251,80	6.327,23	26.756,58
12	Ogan Ilir			-			-	-
13	Ogan Komering Ilir	8.897,80		8.897,80	832,82		832,82	9.730,61
14	Ogan Komering Ulu	31.052,58	7.325,59	38.378,18	16.923,15	339,61	17.262,76	55.640,94
15	Ogan Komering Ulu Selatan	66.097,60	31.289,66	97.387,26	71.905,97	13.449,16	85.355,13	182.742,39
16	Ogan Komering Ulu Timur	2.507,84	612,41	3.120,25	1.801,00	0,00	1.801,00	4.921,25
17	Penukal Abab Lematang Ilir	5.019,67		5.019,67			-	5.019,67
J u m l a h		**342.837**	**129.682**	**472.519**	**166.237**	**68.413**	**234.650**	**707.168,78**

Sumberdata :

1. Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 skala 1:50.000

Peran penting Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan rehabilitasi lahan yang berkelanjutan di daerah, terutama di wilayah kerja dan wilayah kelola UPTD yang wilayahnya tersebar secara administratif di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan melalui program penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air (KTA) dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung DAS yang dituangkan dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL).

Dalam rangka pemulihan lahan kritis di luar Kawasan hutan, pada tahun 2025 Dinas Kehutanan menyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Tahun 2025. Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) adalah rencana yang disusun untuk melakukan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan. Rencana ini disusun pada tahun sebelumnya, yaitu tahun sebelum kegiatan (T-1). Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) merupakan dokumen rencana rehabilitasi lahan yang akan dilaksanakan di luar Kawasan Hutan yang disusun pada tahun sebelum

kegiatan dilaksanakan (T-1) yang bersifat operasional. RTnRL Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS) Tahun 2022– 2032. Dokumen ini merupakan pedoman atau acuan dalam menentukan kegiatan Rehabilitasi Lahan Provinsi Sumatera Selatan dengan berbagai sumber pendanaan antara lain APBD Sumsel, APBN, Sektor Usaha serta penentuan lokasi yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) tahun 2025 adalah agar pelaksanaan rehabilitasi lahan dapat dilaksanakan secara tepat dan terarah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan yang telah ditetapkan dalam RURHL-DAS dalam rangka pemulihan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi dan/atau pengembangan sumberdaya air.

Rehabilitasi Lahan Tahun 2025 wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan diluar kawasan hutan / Areal Penggunaan Lain (APL) pada ekosistem daratan, ekosistem gambut dan ekosistem mangrove. Kegiatan rehabilitasi lahan dapat berupa penerapan vegetatif maupun penerapan sipil teknis. Sasaran kegiatan rehabilitasi lahan melalui penerapan vegetatif di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berupa Kebun Bibit Rakyat, Penghijauan Lingkungan, Agroforestry, Rehabilitasi Lahan Mangrove, Rehabilitasi Lahan Gambut, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH di Luar Kawasan Hutan. Kegiatan rehabilitasi lahan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 melalui penerapan sipil teknis adalah teknik konservasi tanah dan air yang dilaksanakan dalam bentuk pembuatan bangunan berupa Dam Penahan (DPn), Gully Plug (GP) dan Sumur Resapan Air (SRA).

Gambar 3.17 Dokumen RTnRL dan Penyusunan Dokumen RTnRL Tahun 2025

Dinas Kehutanan telah melaksanakan penanaman jenis-jenis Multipurpose Tree Species (MPTS) dan tanaman kayu-kayuan endemik Sumatera Selatan di luar Kawasan hutan seluas 512,44 ha diantaranya melalui : (1) Pembagian bibit kepada masyarakat yang dilaksanakan di 14 UPTD (2) Pembagian bibit kepada masyarakat/kelompok masyarakat. (3) Penanaman dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia HMPI. MPTS adalah tanaman yang memiliki banyak fungsi, seperti menghasilkan buah, kayu, daun, bunga, dan biji. Tanaman MPTS dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti bahan makanan, pakan ternak, dan kayu bakar sehingga bermanfaat secara ekologi, ekonomi dan produksi bagi masyarakat.

Jumlah bibit yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 204.976 batang dengan luas konversi 400 batang/Ha berupa Tanaman Kehutanan, MPTS, dan Tanaman Buah. Sedangkan rincian lokasi penanaman sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.21 Lahan Kritis Di Luar Kawasan Hutan Yang Direhabilitasi Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	UPTD KPH
1.	Palembang	Jakabaring	Jakabaring	0,33	UPTD KPH Wil. III Palembang - Banyuasin
		Seberang Ulu I	Kantor Kejati SumSel	0,51	
		Sako	Sukamaju		
		Alang-Alang Lebar	Talang Kelapo		
		Alang-Alang Lebar	Srijaya		
		Seberang Ulu I	Kantor Kejati SumSel	0,085	
		Ilir Barat	Lorok Pakjo		
		Jakabaring	Danau OPI	1,28	
		Ilir Barat I	Tanjung Barangan		
		Sukarame	Talang Kedondong	0,13	
		Seberang Ulu II	16 Ulu	1,25	
		Gandus	Buper Gandus (HMPI)	1	
Total				***4,59***	
2.	OKI	Tulung Selapan	SP. Tiga Sakti	0,21	UPTD KPH Wil. IV Sungai Lumpur - Riding
		Bumi Harjo Makmur	Lempuing	1	UPTD KPH Wil. V Lempuing - Mesuji
Total				***1,21***	
3.	OKU Timur	Martapura	Sungai Tuha	0,15	

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	UPTD KPH
		Martapura	Sungai Tuha	0,5	UPTD KPH Wil. VI Bukit Nanti - Martapura
		Madang Suku II	Margotani	0,23	
Total				***0,88***	
4.	OKU	Ulu Ogan		1,65	UPTD KPH Wil. VI Bukit Nanti - Martapura
		Sosoh Buay Rayap	Penyandingan	0,16	
		Lubuk Batang	Belatung	0,83	
		Ulu Ogan	Ulak Lebar	0,17	
Total				***2,81***	
5.	OKU Selatan	Muaradua	Kisau	25	UPTD KPH Wil. VII Bukit Mekakau - Saka
		Muaradua	Kisau	25	
		Buay Rawan	Bumi Jaya	300	
		Kisam Tinggi	Pulau Panggung		
		Muaradua Kisam	Ulak Agung Ulu		
		Muaradua	Pelangki		
		Buay Rawan	Bendi	11	
Total				***361***	
6.	Muara Enim	Semende Darat Ulu	Tanjung Agung	2,5	UPTD KPH Wil. VIII Semendo
		Semende Darat Ulu	Tanjung Agung	1,25	
		Semende Darat Ulu	Penyandingan	15	
		Semende Darat Laut	Penyandingan	49	
		Tanjung Agung	Pagar Dewa		
		Semende Darat Ulu	Cahaya Alam		
		Semende Darat Laut	Pulau Panggung	26,16	
		Ujan Mas	Ujan Mas Baru		
		Muara Enim	Muara Enim		
		Panang Enim	Lubuk Nipis		
		Gelumbang		0,24	UPTD KPH Wil. XII Benakat
Total				***94,15***	
7.	Prabumulih	Cambai	Pangkul	0,79	UPTD KPH Wil. IX Suban Jeriji
		Cambai	Pangkul	2,03	
		Cambai	Sindur		
Total				***2,82***	
8.	Lahat	Gumay Ulu	Sumber Karya	0,25	

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	UPTD KPH
		Kikim Timur	Datar Serdang	0,18	UPTD KPH Wil. XI Kikim - Pasemah
		Kikim Timur	Pantikal Lama		
		Tanjung Sakti Pumi	Pulau Panas	0,38	
		Gumay Talang	Tanjung Beringin	0,25	
		Lahat	Bandar Jaya	0,25	
		Lahat Selatan	Tanjung Payang	0,2	
		Lahat	Bandar Jaya		
		Lahat	Pagar Agung	0,1	
		Tanjung Tebat	Air Dingin Lama	1,15	
		Mulak Ulu	Lesung Batu		
		Tebing Tinggi	Rantau Tenang	2,1	
		Jarai	Pelajaran	2,1	
		Merapi Barat	Ulak Pandan	2,1	
		Mulak Ulu	Lesung Batu	0,15	
Total				***9,21***	
9.	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Utara I	Tanjung Raya	0,55	UPTD KPH Wil. XIII Lakitan - Bukit Cogong
		Lubuk Linggau Utara I	Tanjung Raya	0,5	
		Lubuk Linggau Utara I	Belalau I	1	
Total				***2,05***	
10.	Musi Rawas Utara	Karang Jaya	Lubuk Kumbang	20,00	UPTD KPH Wil. XIV Rawas
		Karang Jaya	Batang empedu		
		Karang Jaya	Sukaraja		
		Karang Jaya	Sukaraja	4	
		Karang Jaya	Sukaraja	0,63	
Total				***24,63***	
11.	PALI	Penukal Utara	Tempirai	0,1	UPTD KPH Wil. XII Benakat
Total				***0,1***	
12.	Pagar Alam	Dempo Selatan	Lubuk Buntak	1	UPTD KPH Wil. X Dempo
Total				***1***	
13.	Musi Banyuasin	Bayung Lencir	Mendis Jaya	1	UPTD KPH Wil. II Lalan-Mendis
Total				***1***	
14.	Banyuasin	Banyuasin II	Sungsang IV	7	UPTD KPH Wil. III Palembang - Banyuasin
Total				***7***	

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	UPTD KPH
Grand Total				***512,44***	

Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Bidang RHL Tahun 2025

Gambar 3.18 Kegiatan Penyediaan Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/Tanaman Buah di UPTD KPH

Gambar 3.19 Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan

IKU 5. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)

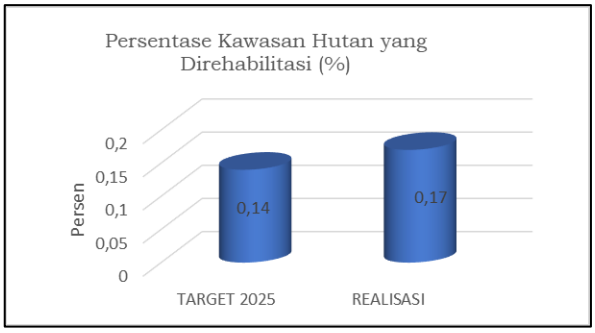

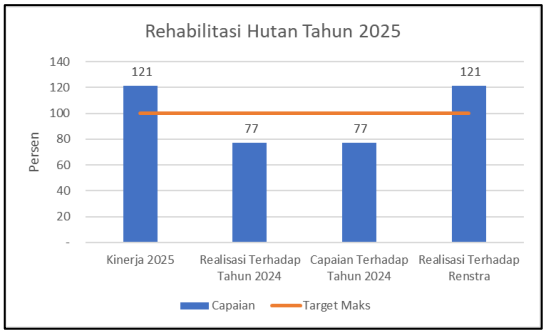

Gambar 3.20 Rehabilitasi Hutan Tahun 2025

Persentase kawasan hutan yang direhabilitasi pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target. Dari target 2025 sebesar 0,14%, realisasi mencapai 0,17%, yang mencerminkan meningkatnya luasan kawasan hutan yang berhasil direhabilitasi melalui kegiatan pemulihan tutupan dan fungsi hutan.

Berdasarkan tabel capaian, kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 121, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 77, dengan capaian terhadap tahun 2024 sebesar 77%. Selain itu, realisasi rehabilitasi kawasan hutan juga telah sepenuhnya sejalan dengan target Renstra, ditunjukkan oleh realisasi terhadap Renstra sebesar 121. Capaian ini menggambarkan konsistensi pelaksanaan program rehabilitasi hutan serta efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pemulihan ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Data Dukung Capaian Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi

Untuk mengatasi masalah lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan rehabilitasi baik di kawasan hutan dan maupun lahan di luar kawasan hutan seluas 707.169 Ha. Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi, reklamasi dan penghijauan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan pada kerangka Daerah Aliran Sungai.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan

guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Penghijauan merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal. Sebagai pengatur tata air untuk mencegah banjir maupun untuk melindungi lingkungan yaitu mencegah timbulnya pencemaran.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Percepatan pelaksanaan penanaman rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 260/KPTS/DISHUT/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Pananaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini mendorong kemajuan rehabilitasi hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang terus meningkat. Progres rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2018 – 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.22 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi												Ket.
				Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des	
a.	Mengurangi Luas Lahan Kritis di dalam dan di Luar Kawasan Hutan (PK Jan - Sept)	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman	10 ha	28,08 ha	30,45 ha	300,26 ha	0,38 ha	1,44 ha	1,19 ha	1,67 ha	0,25 ha	15,70 ha	69,60 ha	47,34 ha	16,08 ha	Penanaman di luar kawasan hutan
		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0,14 %	0,0005 %	0,0077 %	0,0129 %	0,0016 %	0 %	0,0002 %	0,0003 %	0,0007 %	0,0288 %	0,0148 %	0,0231 %	0,0800 %	- Penanaman di dalam kawasan hutan - Luas kawasan hutan Prov Sumsel diluar Kawasan Konservasi : 2.616.844,09 ha
b.	Meningkatnya Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Sungai sebagai Ekosistem Penyangga	Persentase Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	0,13 %										0,07 %	0,09 %	0,30 %	- Penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan - Total Luas Lahan Kritis Prov Sumsel 707.168 ha (SK Dirjen PDASRH Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022)
		Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	1,68 %										0,31 %	0,37 %	1,88 %	Luas sempadan sungai yg masuk dalam RURL (804,16 ha)

Tabel 3.23 Penanaman Didalam Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	Ekosistem	UPTD KPH	Keterangan
1.	Banyuasin	Banyuasin	Kayuara Kuning	1	Daratan	UPTD KPH Wil. III Palembang - Banyuasin	KHDTK Kemampo (BPDAS MUSI)
		Banyuasin II	Rimau Sungsang	0,5	Mangrove		HL Pulau Rimau (CSR PT. Bukit Asam)
		Tungkal Ilir	Bentayan	9	Daratan		Revegetasi Reklamasi (PT. Trimata Benua)
		Banyuasin II	Sungsang 4	1,5	Mangrove		HL Air Telang (PT. Medco E&P Indonesia)
		Banyuasin II	Sungsang 4	2,5	Mangrove		HL Air Telang (PT. Pusri)
		Banyuasin II	Sungsang 4	0,05	Mangrove		HL Air Telang (PT. PLN)
Total				***14,55***			
2.	OKI	Tulung Selapan	Simpang Tiga Abadi	1	Daratan	UPTD KPH Wil. IV Sungai Lumpur - Riding	HL Sungai Lumpur (PT. Odura Energy)
		Tulung Selapan	Simpang Tiga Jaya	10	Mangrove		HL. Sungai Lumpur Mesuji (Rehab DAS PT. Odira Energy Karang Agung)
		Cengal	Kuala Sungai Pasir	38	Daratan	UPTD KPH Wil. V Lempuing - Mesuji	HL Pantai Timur
		Cengal	Kuala Sungai Pasir	40	Daratan		HL Pantai Timur
		Pedamaran	Cita Jaya	243,49	Gambut		HPT Pedamaran (Rehap DAS PT. Trimata Benua)
		Pedamaran	Cita Jaya	410	Gambut		HPT Pedamaran (Rehap DAS PT. Trans Power Indonesia)
		Tulung Selapan	Simpang Tiga Jaya	3	Mangrove	UPTD KPH Wil. IV Sungai Lumpur - Riding	HL. Sungai Lumpur Mesuji (Rehab DAS PT. Odira Energy Karang Agung)
Total				***745,49***			
3.	OKU Timur	Buay Pemuka Peliung	Banuayu	1,75	Daratan	UPTD Wil. VI Bukit Nanti - Martapura	HP Martapura(Swadaya KTH)
		Buay Pemuka Bangsa Raja	Muncak Kabau	2,3	Daratan		HP Martapura(Swadaya KTH)
		Buay Pemuka Peliung	Banuayu	10	Daratan		HP Martapura (Folu Net SinK)
Total				***14,05***			
4.	OKU Selatan	Banding Agung	Tanjung Agung	400	Daratan	UPTD KPH Wil. VII Bukit	HL Mekakau (BPDAS MUSI)
		Banding Agung	Telanai	100	Daratan		HL Mekakau (BPDAS MUSI)

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	Ekosistem	UPTD KPH	Keterangan
		Buana Pemaca	Gemiung	130	Daratan	Mekakau - Saka	HL. Saka (Rehab DAS PT. Sumsel Energy Pewali)
Total				***630***			
5.	Muara Enim	Lawang Kidul	Tegal Rejo	12	Daratan	UPTD KPH Wil. VIII Semendo	HP Bukit Asam (Revegetasi PT. Bara Anugerah Sejahtera)
		Semende Darat Ulu	Tanjung Agung	20	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
		Semende Darat Ulu	Tanjung Agung	100	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
		Lawang Kidul	Keban Agung	440,29	Daratan	UPTD KPH Wil. IX Suban Jeriji	HP Air Laya (Revegetasi PT. BA)
			Tanjung Enim				
		Merapi Selatan	Geramat	201	Daratan		HL Isau-Isau (Rehab DAS PT. BA)
		Tanjung Agung	Tanjung Lalang				
		Tanjung Agung	Tanjung Karangan	435	Daratan		HL Isau-Isau (Rehab DAS PT. Batubara Bukit Kendi)
Total				***1208,29***			
6.	Pagar Alam	Dempo Tengah	Jokoh	100	Daratan	UPTD KPH Wil. X Dempo	HL Bukit Jambul Gunung Patah (CSR PT. Galtam)
		Dempo Tengah	Jokoh	353	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (Rehab DAS PT. Galtam)
		Dempo Tengah	Candi Jaya	10	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
		Dempo Utara	Agung Lawangan	10	Daratan		
		Dempo Selatan	Kance Diwe	75	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
				390,2	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (Rehab DAS PT. Triaryani)
		Dempo Utara	Agung Lawangan	100	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
		Dempo Tengah	Candi Jaya	90	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
Total				***1128,2***			
7.	Lahat	Tanjung Sakti Pumi	Pulau Panas	10	Daratan	UPTD KPH Wil. XI Kikim - Pasemah	HL Bukit Dingin (PT. Pusri di Areal HKM Ayek Baku)
		Tanjung Sakti Pumi	Pulau Panas	3	Daratan		HL Bukit Dingin (BPTH)
		Tanjung Sakti Pumi	Pulau Panas	0,2	Daratan		HL Bukit Dingin (Swakelola KTH)
		Gumay Ulu	Sinjar Bulan	10	Daratan		HPT Gumay Tebing Tinggi (BPDAS Musi)
		Merapi Selatan	Tanjung Beringin	1	Daratan		HL Isau-Isau

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	Ekosistem	UPTD KPH	Keterangan
		Tanjung Sakti	Pulau Panas	1	Daratan		HL Bukit Dingin (BPTH)
Total				***25,2***			
8.	Musi Rawas	Megang Sakti	Mekar Sari	410	Daratan	UPTD KPH Wil. XIII Lakitan - Bukit Cogong	Hp Lakitan Utara I (PT. PML)
		Selangit	Taba Tengah	134,6	Daratan		HPT Hulu Tumpah (BPDAS Musi)
Total				***544,6***			
9.	Musi Rawas Utara	Rawas Ulu	Sungai Baung	3,00	Daratan	UPTD KPH Wil. XIV Rawas	HP Rawas Utara II (CSR PT. Esa Yasa Dinamika)
		Rawas Ulu	Sungai Baung	8,68	Daratan		HP Meranti Hulu Sungai Kapas (PT. Esa Yasa Dinamika)
		Rawas Ulu	Sungai Baung	108,06	Daratan		HP Rawas (PT. Esa Yasa Dinamika)
Total				***119,74***			
10.	Musi Banyuasin	Bayung Lencir	Muara Medak	1	Daratan	UPTD KPH Wil. II Lalan - Mendis	Hutan Produksi (KTH Karya Liberika)
		Sanga Desa	Keban	10	Daratan	UPTD KPH Wil. I Meranti	HP Meranti Sungai Merah
		Batang Hari Leko	Pangkalan Bulian	10	Daratan		
		Batang Hari Leko	Pangkalan Bulian	12	Daratan		
Total				***33,00***			
Grand Total				***4.463, 12***			

Sumberdata : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2025.

Sasaran 4. Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial

Kinerja pada sasaran 4 dicapai melalui indikator kinerja Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%).

Tabel 3.24 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
IV	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	140	352	251,4

Total pagu untuk mendukung sasaran 4 sebesar Rp. 436.681.400,- dengan realisasi keuangan 95,90% dan realisasi fisik 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

IKU 6. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)

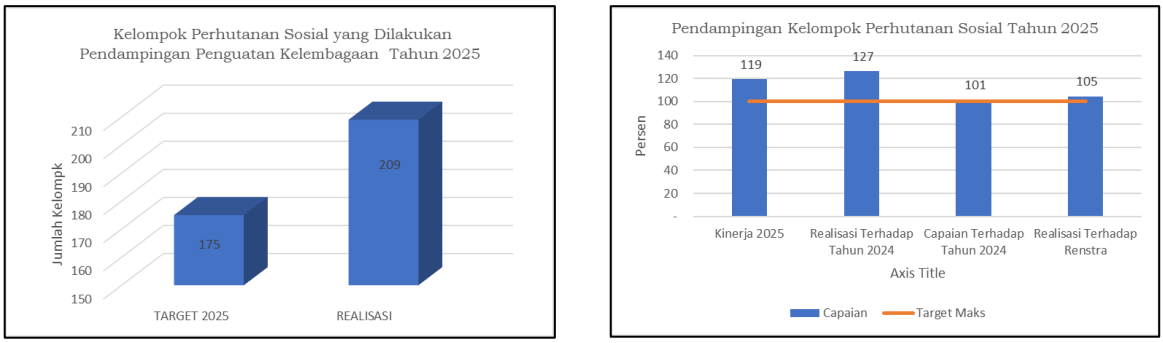

Gambar 3.21 Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial Tahun 2025

Pendampingan penguatan kelembagaan bagi kelompok perhutanan sosial pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang melampaui target. Dari target 175 kelompok, realisasi mencapai 209 kelompok, yang mencerminkan meningkatnya intensitas pendampingan serta komitmen dalam memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok perhutanan sosial.

Berdasarkan tabel capaian, kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 119, dengan realisasi terhadap tahun 2024 sebesar 127 dan capaian terhadap tahun 2024 sebesar 101%, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi terhadap Renstra sebesar 105 menandakan bahwa kegiatan pendampingan telah berjalan selaras dan melampaui target perencanaan jangka menengah. Capaian ini menggambarkan keberhasilan strategi pembinaan kelembagaan dalam mendukung kemandirian dan keberlanjutan pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Dukungan program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2024 sebagai berikut :

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan

a) Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan dalam rangka Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi

Kegiatan penyuluhan kehutanan merupakan suatu upaya investasi dalam bentuk pendidikan/pelatihan/sosialisasi/penelitian guna peningkatan produktivitas pelaku utama dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan/hutan.

Gambar 3.22 Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

b) Pelatihan ArcGis bagi Penyuluh Kehutanan

Pendidikan penyuluhan merupakan program edukasi mandiri untuk para petani yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian baik secara fisik, biologi dan sosial yang dikemas dalam bentuk konsep, prinsip-prinsip dan prosedur.Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu sebanyak 33 orang sesuai dengan surat panggilan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 500.4.2.5/4560/Dishut-V/2025 tanggal 17 September 2025 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Arc GIS dengan unsur:

a) Penyuluh Kehutanan PNS sebanyak 19 orang
b) Penyuluh Kehutanan P3K sebanyak 8 orang
c) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sebanyak 2 orang
d) Staf Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 4 orang

Gambar 3.23 Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan dalam Pelatihan Arc GIS Tahun Anggaran 2025

c) Workshop kegiatan penyuluhan kehutanan dalam bentuk Pameran Hasil Hutan Anggaran tahun 2025, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan telah mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam bentuk pameran/workshop. Pameran adalah kegiatan untuk mempertunjukkan secara sistematis tentang model, benda contoh, spesimen, barang asli, peta, grafik, gambar atau foto di suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu.

Gambar 3.24 Pameran Sriwijaya Expo Tahun 2025 dan Pameran Festival Rempah Tahun Anggaran 2025

Kegiatan dalam rangka penguatan dan pendampingan juga diiringi dengan penyediaan Alat Ekonomi Produktif yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus bagi kelompok tani hutan yang menyasar 9 KTH. Dana DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2025 ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mendapatkan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) guna mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 3.25 Penyerahan Alat Ekonomi produktif

Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 terdata sebanyak 48 usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan luas ±4.706 Ha. Adapun Kelompok Perhutanan Sosial yang mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Tahun 2025 sebanyak 3 unit dan ketiga unit tersebut merupakan persetujuan perhutanan sosial melalui skema Kemitraan Konsesi.Penerima manfaat tersebut diantaranya:

a) KTH Jaya Makmur melalui skema kemitraan konsesi dengan PT Musi Hutan Persada, penerima manfaat sebanyak 85 KK dengan luas 216,44 Hektar di wilayah kelola UPTD KPH Wilayah IX Subanjeriji;
b) KTH Tunas Harapan melalui skema kemitraan konsesi dengan PT Musi Hutan Persada, penerima manfaat sebanyak 51 KK dengan luasan 196,39 hektar yang berada di wilayah kelola UPTD KPH Wilayah XII Benakat; dan
c) KTH Rawas Ulu melalui skema kemitraan konsesi dengan PT Esa Yasa, penerima manfaat sebanyak 51 KK dengan luasan mencapai 176 hektar dan berada di wilayah kelola UPTD KPH Wilayah XIV Rawas.

Tabel 3.25 Persetujuan Perhutanan Sosial terbit Tahun 2025

No.	UPTD KPH	Tahun						Jumlah KPS
		2010 - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Wilayah I Meranti	10	-	3	-	-	-	**13**
2	Wilayah II Lalan Mendis	8	-	3	1	4	-	**16**
3	Wilayah III Palembang-Banyuasin	16	4	7	1	3	-	**31**
4	Wilayah IV Sungai Lumpur-Riding	2	-	2	-	-	-	**4**
5	Wilayah V Lempuing-Mesuji	28	-	-	-	-	-	**28**
6	Wilayah VI Bukit Nanti-Martapura	36	-	-	-	-	-	**36**
7	Wilayah VII Mekakau Saka	31	-	4	-	-	-	**35**
8	Wilayah VIII Semendo	23	-	-	-	1	-	**24**
9	Wilayah IX Suban Jeriji	2	1	3	-	-	1	**7**
10	Wilayah X Dempo	10	-	-	-	-	-	**10**
11	Wilayah XI Kikim Pasemah	4	-	1	1	-	-	**6**
12	Wilayah XII Benakat	1	-	4	-	-	1	**6**
13	Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong	7	1	-	-	-	-	**8**
14	Wilayah XIV Rawas	-	-	-	1	1	1	**3**
	Jumlah	**178**	**6**	**27**	**4**	**9**	**3**	**227**

Jumlah usulan perhutanan sosial yang ditindaklajuti dengan verifikasi teknis sebanyak 17 usulan dengan hasil sebanyak 10 usulan dapat dipertimbangkan untuk proses lebih lanjut dan 7 usulan tidak dapat diproses lebih lanjut. Usulan yang tidak dapat diproses, disebabkan karena kondisi objek atau areal yang diusulkan masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya terdapat tanaman sawit, kondisi lahannya masih berupa hutan primer, gambut dalam fungsi lindung dan belum ada kepastian batas administrasi desa. Permasalahan juga merujuk pada subjek penerima dikarenakan belum mendapatkan persetujuan di beberapa lokasi oleh Kepala Desa setempat dalam hal penandatanganan pernyataan terkait lahan garapan para anggota Kelompok Tani Hutan.

Kegiatan Dinas Kehutanan yang bekerja sama dengan mitra/NGO untuk pencapaian target pendampingan kepada Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.26 Kegiatan pendampingan Masyarakat bekerjasama dengan Mitra/NGO

No.	Mitra/NGO	Kegiatan	Lokasi dan Waktu	Ket.
1.	Hutan Kita Institute (HaKI)	Menjadi Narasumber pada *Focus Group Discussion* (FGD) untuk Fasilitasi Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) di HKm Tanjung Lestari, HKm Bunga Tanjung, HKm Nahara Indah, dan HKm Cahaya Makmur	Desa Tanjung Agung dan Desa Sumber Makmur, Kec. Banding Agung, Kab. OKU Selatan, 18 – 20 Januari 2025	
2.	*International Centre for Research in Agroforestry* (ICRAF) Indonesia	Pelatihan Pengelola Sistem Informasi Akses Percepatan Perhutanan Sosial (SiAlam) Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, 10 – 11 Desember 2025	

Sumberdata: Bidang PPM Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Data Dukung Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)

Pengelolaan hutan yang lestari disertai dengan peningkatan fungsinya dapat terwujud, apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh adanya partisipasi aktif oleh seluruh masyarakat dan instansi terkait lainnya. Peran serta aktif masyarakat dapat terealisasi apabila mereka mengetahui dan sadar serta peduli terhadap eksistensi hutan bagi mereka.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan upaya Gerakan memasyarakatkan hutan dan peduli lingkungan serta seksistensinya melalui kegiatan penyuluhan kehutanan yang didukung oleh perencanaan penyuluhan yang mantab dan berkesinambungan. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi penyuluhan kehutanan tersebut, berbagai upaya telah dan akan dilakukan antara lain penetapan berbagai ketetapan atau pronsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan para penyuluhan kehutanan.

Gambar 3.26 Bimbingan Teknis Kelompok Tani Hutan

Gambar 3.27 Pendampingan Kelompok Tani Hutan

Tabel 3.27 Rekapitulasi Persetujuan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 2025

UPTD KPH	Kab	HD			HKm			HTR			Kemitraan			Hutan Adat			Total		
		Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK
WIL. I MERANTI	Muba	0	0,00	0	6	3214,29	856	4	6.821,00	283	3	960,00	285	0	0	0	13	10.995,29	1.424
WIL. II LALAN-MENDIS	Muba, Banyuasin	2	12.185,00	1.294	9	6945,00	929	2	4.080,00	484	3	17.373,14	3.032	0	0	0	16	40.583,14	5.739
WIL. III PALEMBANG-BANYUASIN	Banyuasin	1	553,00	19	27	6245,50	1745	0	0,00	0	3	1.548,00	882	0	0	0	31	8.346,50	2.646
WIL. IV SUNGAI LUMPUR-RIDING	OKI	1	505,00	26	2	2139,00	160	0	0,00	0	1	10.000,00	1.700	0	0	0	4	12.644,00	1.886
WIL. V LEMPUING - MESUJI	OKI	0	0,00	0	0	0,00	0	28	7.150,34	2.654	0	0,00	0	0	0	0	28	7.150,34	2.654
WIL. VI BUKIT NANTI-MARTAPURA	OKU, OKU Timur	0	0,00	0	4	1030,00	508	32	1.915,73	269	0	0,00	0	0	0	0	36	2.945,73	777
WIL. VII MEKAKAU-SAKA	OKU Selatan	0	0,00	0	32	16289,64	3824	3	2.217,00	337	0	0,00	0	0	0	0	35	18.506,64	4.161
WIL. VIII SEMENDO	Muara Enim, Lahat	14	17.878,00	3.872	9	3058,00	950	0	0,00	0	0	0,00	0	1	44	344	24	20.979,70	5.166
WIL. IX SUBANJERIJI	Muara Enim, Prabumulih	1	175,00	791	5	499,70	218	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	6	674,70	1.009
WIL. X DEMPO	Pagar Alam	0	0,00	0	9	2923,00	1116	0	0,00	0	0	0,00	0	1	336	234	10	3.259,00	1.350

UPTD KPH	Kab	HD			HKm			HTR			Kemitraan			Hutan Adat			Total		
		Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK
WIL. XI KIKIM PASEMAH	Lahat, Empat Lawang	1	313,00	260	5	2238,40	660	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	6	2.551,40	920
WIL. XII BENAKAT	Muara Enim, Pali, Muba, Mura, Lahat	0	0,00	0	1	5800,00	541	0	0,00	0	4	274,79	100	0	0	0	5	6.074,79	641
WIL. XIII LAKITAN-BUKIT COGONG	Mura	7	2.897,00	4.504	1	290,00	90	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	8	3.187,00	4.594
WIL. XIV RAWAS	Muratara	1	1.104,00	67				0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	1	1.104,00	67
JUMLAH		**28**	**35.610,00**	**10.833**	**110**	**50.672,53**	**11.597**	**69**	**22.184,07**	**4.027**	**14**	**30.155,93**	**5.999**	**2**	**380**	**578**	**223**	**139.002,23**	**33.034**

Penyuluh kehutanan merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. Penyuluh kehutanan pada hakikatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lainnya, yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi dalam mengamankan dan melestarikan sumber daya hutan sebagai asset negara, dan upaya mensejahterakan masyarakat.

Keberadaan penyuluh kehutanan dalam menunjang pembangunan kehutanan, diperlukan tidak hanya di tengah masyarakat dalam atau sekitar Kawasan hutan yang rusak maupun yang masih baik, pada lahan-lahan masyarakat dan hutan-hutan rakyat, dan bahkan juga di daerah perkotaan. Kehadiran penyuluh kehutanan yang melaksanakan tugas dan perannya dengan baik di suatu wilayah diharapkan akan dapat membawa dampak nyata dan positif terhadap kemajuan pembangunan kehutanan di wilayah tersebut, serta membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan dan kehutanan.

Salah satu kriteria untuk mengukur kemajuan pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui penilaian kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibedakan menjadi tiga kelas, yaitu kelas pemula, madya, dan utama. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha Berdasarkan penilaian terhadap KTH yang mengelola Kawasan hutan kelas Madya baru 25,57% sedangkan untuk KTH yang membudidayakan tanaman kehutanan (di luar Kawasan hutan) hanya 16,67%. Hal ini tantangan bagi Dinas Kehutanan untuk dapat meningkatkan kelas KTH bagi 223 Kelompok Perhutanan Sosial dan 30 KTH.

Tabel 3.28 Hasil Penilaian Kelas Kelompok Perhutanan Sosial

No	UPTD KPH	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial		Kelas KTH		
			Blm Dinilai	Pemula	Madya	Utama
1.	Meranti	13	12	1	0	0
2.	Lalan Mendis	12	5	5	2	0
3.	Palembang Banyuasin	28	23	4	1	0
4.	Sungai Lumpur Riding	4	4	0	0	0
5.	Lempuing Mesuji	28	10	5	13	0
6.	Bukit Nanti Martapura	9	0	6	3	0
7.	Mekakau Saka	35	19	6	10	0
8.	Semendo	23	3	0	20	0
9.	Suban Jeriji	6	4	2	0	0
10.	Dempo	10	3	0	7	0
11.	Kikim Pesemah	5	4	0	1	0

12.	Benakat	5	4	1	0	0
13.	Lakitan Bukit Cogong	8	1	7	0	0
14.	Rawas	1	1	0	0	0
JUMLAH		**187**	**93**	**37**	**57**	**0**

Tabel 3.29 Kelas Kelompok Tani Hutan (Di Luar Kawasan Hutan)

No	UPTD KPH	Jumlah KTH	Kelas KTH		
			Pemula	Madya	Utama
1.	Meranti	-	-	-	-
2.	Lalan Mendis	-	-	-	-
3.	Palembang Banyuasin	-	-	-	-
4.	Sungai Lumpur Riding	-	-	-	-
5.	Lempuing Mesuji	-	-	-	-
6.	Bukit Nanti Martapura	2	2	-	-
7.	Mekakau Saka	1	-	1	-
8.	Semendo	8	6	2	-
9.	Suban Jeriji	22	20	2	-
10.	Dempo	-	-	-	-
11.	Kikim Pesemah	2	1	1	-
12.	Benakat	-	-	-	-
13.	Lakitan Bukit Cogong	1	1	-	-
14.	Rawas	-	-	-	-
JUMLAH		**36**	**30**	**6**	**0**

Dinas Kehutanan telah melaksanakan upaya pendampingan KTH, namun hasil yang diharapkan belum optimal. Jumlah SDM (penyuluh kehutanan) dan sebarannya tidak merata dan belum bisa mengakomodir kegiatan penyuluhan/pendampingan pada KTH. PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) juga belum dapat diakomodir dalam kegiatan pendampingan karena keterbatasan pendanaan, padahal PKSM merupakan potensi yang dapat membantu pemerintah untuk melakukan pendampingan karena biasanya PKSM berdomisili di sekitar Kawasan hutan. Jumlah dan sebaran penyuluh kehutanan dan kelompok masyarakat.

Tabel 3.30 Jumlah dan sebaran penyuluh kehutanan dan kelompok masyarakat

No	UPTD KPH	Lokasi Penempatan	PK ASN Dalam Jabatan					Jumlah KPS/KTH		
			PNS	P3K	Non ASN (PPTPK)	PKSM	PKSM	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Jumlah
1.	Dinas Kehutanan	Palembang	3	8	-	-	**11**	-	-	-
2.	Wil. I Meranti	Sekayu	1	1	-	-	**2**	13	-	13
3.	Wil. II Lalan Mendis	Bayung Lencir	3	1	-	2	**6**	16	-	16

No	UPTD KPH	Lokasi Penempatan	PK ASN Dalam Jabatan					Jumlah KPS/KTH		
			PNS	P3K	Non ASN (PPTPK)	PKSM	PKSM	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Jumlah
4.	Wil. III Palembang-Banyuasin	Palembang	4	1	1	-	**6**	31	-	31
5.	Wil. IV Sungai Lumpur-Ridding	OKI	1	1	1	4	**7**	4	-	4
6.	Wil. V Lempuing Mesuji	OKI	3	1	1	4	**G**	28	-	28
7.	Wil. VI Bukit Nanti-Martapura	Baturaja	6	3	2	5	**16**	36	2	38
8.	Wil. VII Mekakau Saka	Muara Dua	2	2	1	13	**18**	35	1	36
9.	Wil. VIII Semendo	Muara Enim	1	2	2	23	**28**	24	8	32
10.	Wil. IX Suban Jeriji	Prabumulih	4	1	-	27	**32**	6	22	28
11.	Wil. X Dempo	Pagar Alam	1	1	-	2	**4**	10	-	10
12.	Wil. XI Kikim Pesemah	Lahat	4	1	1	3	**G**	6	2	8
13.	Wil. XII Benakat	PALI	1	1	-	1	**3**	5	-	5
14.	Wil. XIII Lakitan Bukit Cogong	Lubuk Linggau	5	1	1	10	**17**	8	1	9
15.	Wil. XIV Rawas	Musi Rawas	0	-	1	-	**1**	2	-	2
JUMLAH			**36**	**25**	**11**	**64**	**166**	**224**	**36**	**260**

Dampak dari pendampingan terhadap KTH yang mengelola usaha kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan, di antaranya: Peningkatan pendapatan masyarakat, Peningkatan penyerapan tenaga kerja, Peningkatan Indeks Desa Mandiri (IDM), dan Peningkatan tutupan lahan. Salah satu parameter kinerja penyuluh kehutanan dalam mendampingi KTH adalah nilai transaksi ekonomi (NTE). NTE KTH dihitung dan direkam pada aplikasi SIMLUH. Pengukuran NTE KTH merupakan kewajiban penyuluh kehutanan pendamping KTH binaannya. NTE perhutanan sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mencapai Rp 41,7 milyar, sedangkan NTE KTH mencapai Rp 2,3 milyar. Sementara itu, potensi NTE baik KTH maupun perhutanan sosial bisa mencapai lebih dari nilai tersebut, apabila seluruh KTH memperoleh pendampingan penyuluh.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai IKU 6 berupa kualitas dari pendampingan kelompok tani itu sendiri dan hasil yang diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a) Jumlah, sebaran dan kompetensi SDM penyuluh kehutanan yang belum memadai
b) Penyuluhan memerlukan alokasi dana yang tinggi, mengingat keberadaan KTH tersebar dan akses menuju lokasi sulit terutama untuk wilayah perairan.
c) Belum adanya kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota mendukung Perhutanan Sosial. Pemerintah daerah masih berpendapat bahwa kehutanan adalah wewenangnya Pemerintah Provinsi.
d) Pemberdayaan PKSM

e) Pemegang persetujuan perhutanan sosial (KTH) yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
f) Masih terjadinya konflik tenurial dalam areal kawasan hutan maupun dalam lokasi persetujuan perhutanan sosial
g) Potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang ada belum bisa dikembangkan secara optimal dikarenakan keterbatasan modal serta sarana dan prasarana pendukung
h) Optimalisasi manajemen kelembagaan tani yang masih kurang
i) Kelompok tani hutan di luar kawasan hutan yang belum terdata dengan baik
j) Pelibatan KTH di luar kawasan hutan dalam kegiatan pembangunan kehutanan yang belum memadai, karena masih terfokus kegiatan pembangunan kehutanan di dalam kawasan hutan.
k) Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang belum berjalan secara optimal.
l) Pemanfaatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber yang masih rendah, seperti akses permodalan, pemasaran dan diversifikasi produk serta jalinan kemitraan yang masih belum terfasilitasi dengan baik.

Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar 100%, yang diperoleh dari jumlah kegiatan operasionalisasi perkantoran yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan operasionalisasi perkantoran pada tahun 2024. Kinerja pada sasaran 5 dicapai melalui indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%).

Tabel 3.31 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
V	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	7.	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	100	95,46	95,46

IKU 7. Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)

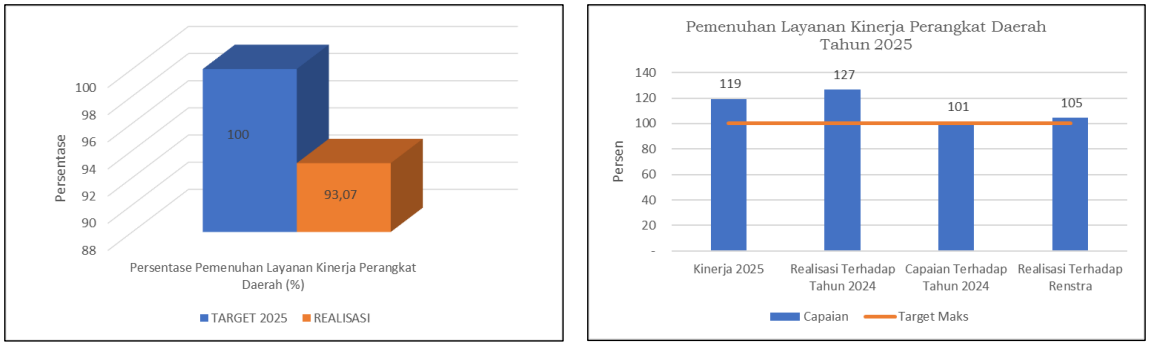

Gambar 3.28 Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan diagram pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah tahun 2025, terlihat bahwa realisasi kinerja mencapai 93,07% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar layanan kinerja telah terpenuhi dengan baik meskipun masih terdapat selisih kecil terhadap target maksimal. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif perbandingan kinerja, capaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan nilai kinerja mencapai 119%, meningkat signifikan dibandingkan realisasi terhadap tahun 2024 yang mencapai 127%, serta capaian terhadap tahun 2024 sebesar 101%. Selain itu, realisasi kinerja terhadap target Renstra juga tercapai sebesar 105%, yang menandakan bahwa kinerja perangkat daerah tidak hanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga telah melampaui sasaran strategis jangka menengah. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan, efektivitas pelaksanaan program, serta konsistensi perangkat daerah dalam mencapai dan melampaui target kinerja yang telah direncanakan.

Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan"

Gambar 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tersaji pada tabel, dapat disimpulkan bahwa tujuan "Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan" secara umum telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan mayoritas indikator mencapai bahkan melampaui target Renstra. Pada aspek kondisi biofisik hutan, persentase tutupan lahan sebagai IKU utama mencapai 100%, dengan realisasi terhadap Renstra sebesar 94%, yang mengindikasikan stabilitas tutupan hutan tetap terjaga meskipun masih memerlukan penguatan perlindungan kawasan. Dari sisi kontribusi ekonomi, sasaran meningkatnya peran sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah menunjukkan capaian sangat tinggi, ditandai oleh laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 364% serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 238,65%, yang masing- masing jauh melampaui target Renstra. Hal ini

mencerminkan meningkatnya nilai tambah sektor kehutanan terhadap ekonomi regional.

Selanjutnya, pada sasaran penguatan kelembagaan dan usaha perhutanan sosial, indikator peningkatan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dan peningkatan kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menunjukkan kinerja yang relatif tinggi, dengan capaian kinerja tahun 2025 masing-masing 213,67% dan

154,33%, meskipun realisasi terhadap Renstra pada indikator KUPS masih tergolong moderat. Sementara itu, indikator peningkatan akses legal masyarakat melalui Perhutanan Sosial telah mencapai 75,09%, namun masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya dan target Renstra, sehingga memerlukan percepatan penetapan izin dan pendampingan masyarakat. Pada sasaran pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, indikator pengendalian deforestasi menunjukkan capaian kinerja yang tinggi, disertai peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Indeks Keanekaragaman Hayati yang telah mencapai atau mendekati target Renstra, menandakan pengelolaan ekosistem hutan yang semakin berkelanjutan.

Pada sasaran perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai, capaian indikator rehabilitasi lahan kritis dan tutupan lahan sempadan sungai menunjukkan hasil sangat signifikan, bahkan jauh melampaui target Renstra, yang mengindikasikan keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai penyangga ekosistem. Adapun pada sasaran peningkatan tata kelola organisasi perangkat daerah, indikator pemenuhan layanan kinerja dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah mencapai di atas 90% serta relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas dan perbaikan tata kelola organisasi. Secara keseluruhan, capaian IKU dan IKK menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan telah dicapai secara efektif, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek akses perhutanan sosial dan peningkatan kualitas layanan kinerja agar keberlanjutan kinerja dapat terus terjaga.

D. Inovasi

Inovasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pembinaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan bersama lembaga penelitian ICRAF di UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis

   Pembelajaran-pembelajaran berbasis masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui praktik pertanian cerdas iklim

   - Manfaat/dampak Inovasi :

   Menambah ilmu dan wawasan masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi melalui pemanfaatan kebun dapur disekitar tempat tinggal

2. Pemanfaatan buah nipah sebagai bahan baku tepung free gluten di UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Riding

   Pemanfaatan HHBK Tanaman Nipah berupa pembuatan tepung free gluten untuk bahan baku kukis dan aneka olahan berbahan dasar tepung.

   - Manfaat/dampak Inovasi:

   Peningkatan nilai ekonomi buah nipah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Program Pohon Asuh di Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa UPTD KPH Wilayah X Dempo

   Program pohon asuh di latar belakangi programpenyelamatan hutan yang dikembangkan untuk menyaring pendanaan dari banyak pihak sebagai motor pembiayaan operasionalperlindungan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang sudah menjaga hutan.Program Pohon Asuh di Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa di prakarsai oleh Masyarakat Hutan Adat

   - Manfaat/dampak Inovasi:

   Terasuhnya 23 batang pohon yang tumbuh dalam wilayah Hutan Adat.

4. Ekowisata Enau Anggun Lestari di UPTD KPH Wilayah XII Benakat

   Ekowisata yang memadukan 3 pengelolaan yaitu Jasa Lingkungan, Agro Silvopustura dan Persemaian. Pembangunan Ekowisata Enau Anggun Lestari di Latarbelakangi dengan adanya areal belum berijin seluas 398 Ha yang berada di Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Kepala UPTD KPH Wilayah XII Benakat bersama Kelopok Tani Hutan Enau

Anggun Makmur berkolaborasi membangun Ekowisata tersebut yang saat ini masih dalam proses pembangunan

- Manfaat/dampak Inovasi:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelompok tani hutan, menjadi salahsatu pilihan wisata baru di Kabupaten Musi Rawas, Mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru.

5. Sistem Pembinaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (SIPEGAS-KEHATI)

Sistem digital yang digunakan untuk memantau, membina, dan mengawasi kegiatan konservasi keanekaragaman hayati secara terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Diperlukan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efisien untuk memastikan pelaksanaan kegiatan konservasi berjalan sesuai target dan standar, serta mencegah penyimpangan dalam penggunaan sumber daya.

- Manfaat/dampak Inovasi:

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan konservasi, mempercepat pelaporan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

6. Sistem Informasi Akses Lahan untuk Masyarakat (SI ALAM)

Sistem Informasi yang dikembangkan untuk melakukan persiapan terhadap Calon Kelompok Perhutanan Sosial guna penyediaan data terhadap skema perhutanan sosial yang akan dipilih. Sistem ini dikembangkan dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada tingkat tapak, untuk melihat potensi lahan yang akan diajukan menjadi perhutanan sosial, memberikan interaksi dua arah kepada masyarakat dalam rangka kelengkapan berkas yang diperlukan guna mengajukan permohonan perhutanan sosial dan menyediakan data dan informasi jumlah Kelompok Tani Hutan yang mengajukan permohonan perhutanan sosial di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

- Manfaat/dampak Inovasi:

Memonitoring perkembangan calon penerima manfaat kelompok perhutanan sosial dan para pendamping.

E. Penghargaan

1. Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan dalam hal Dinas Kehutanan

sebagai Perangkat Daerah yang Responsif Gender dalam acara Hari Ibu ke 97 Tahun 2025 dan Penghargaan atas Focal Point Teraktif.

Gambar 3.30 Sertifikat Penghargaan dan Pemberian Penghargaa dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

2. Penghargaan Dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam Surat Keputusan Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Penetapan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Efektif Dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera Dan Hutan Lestari Tahun 2025 (Penetapan KPH efektif) kepada UPTD KPH Wilayah I Meranti.

Gambar 3.31 SK Penetapan KPH Efektif Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Tahun 2025 merupakan tahun strategis bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat implementasi pengelolaan hutan secara lestari serta mendorong kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara nyata mendukung terwujudnya Visi "Sumsel Maju Terus untuk Semua", dan misi khususnya melalui pengelolaan hutan untuk mewujudkan kelestarian hutan yang berkelanjutan. Kinerja Dinas Kehutanan menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dengan mayoritas indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tujuan Pengelolaan Hutan Secara Lestari, capaian kinerja menunjukkan peningkatan signifikan. Produktivitas kawasan hutan tercermin dari realisasi Pembayaran PNBP sebesar Rp109,98 miliar atau 141,94% dari target, yang didorong oleh peningkatan aktivitas pemanfaatan hasil hutan dan kepatuhan pelaku usaha kehutanan.
2. Upaya pengendalian kerusakan hutan juga berjalan sangat efektif, ditunjukkan oleh capaian patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove sebesar 427,87%, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang mencapai 236,61% dari target.
3. Rehabilitasi, kegiatan penanaman pada lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai 5.124,40%, menunjukkan percepatan pemulihan lingkungan yang sangat signifikan.
4. Penguatan usaha ekonomi perhutanan sosial juga menunjukkan kinerja positif melalui pendampingan kelembagaan kelompok perhutanan sosial yang mencapai 119,43%. Sementara itu, tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada sektor kehutanan tetap terjaga dengan tingkat pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah sebesar 93,07%, yang dikategorikan sangat tinggi.
5. Pada tujuan Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan, indikatorstrategis seperti persentase tutupan lahan berhasil dipertahankan sesuai target, yaitu 18,8%.
6. Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah menunjukkan tren sangat positif, ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan sebesar 0,91% (364% dari target) serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 3,89% atau 238,65% dari target.

7. Dari aspek pemberdayaan masyarakat, kapasitas dan kemandirian Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) mengalami peningkatan signifikan, masing-masing mencapai 213,67% dan 154,33% dari target. Namun demikian, indikator peningkatan akses legal masyarakat melalui perhutanan sosial masih berada pada kategori sedang dengan capaian 75,09%, yang menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
8. Pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, Dinas Kehutanan berhasil menekan deforestasi hingga 0,214%, jauh lebih baik dari target, serta meningkatkan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Indeks Keanekaragaman Hayati, yang seluruhnya berada pada kategori sangat tinggi.
9. Upaya rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan, dengan capaian rehabilitasi lahan kritis sebesar 353,85% dan peningkatan tutupan lahan sempadan sungai sebesar 152,38%.
10. Dari sisi tata kelola organisasi, kinerja perangkat daerah tetap terjaga dengan tingkat pemenuhan layanan kinerja sebesar 93,07% serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) yang mencapai 94,96%, mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

B. Langkah Strategis

Langkah Strategis yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja Dinas Kehutanan yang ditunjukan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja terhadap target yang ditetapkan sangat tinggi. Hal ini didukung oleh 5 (lima) program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Nilai efisiensi kegiatan APBD Dinas kehutanan secara keseluruhan 69,73 termasuk kategori efisien (70%-60%).
2. Kegiatan yang tidak menunjang keberhasilan indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan (3) Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

3. Upaya percepatan perlu dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar kendala-kendala dan persyaratan usulan perhutanan sosial dapat diketahui dan segera dipenuhi untuk mempercepat proses penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan. Capaian Tahun 2025 tetap tinggi, menunjukkan penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024, seperti pada kegiatan patroli pengamanan kawasan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
4. Beberapa indikator masih memerlukan penguatan dan percepatan untuk mencapai target jangka menengah dan jangka panjang, khususnya pada indikator peningkatan kelas KUPS, perluasan akses legal perhutanan sosial, tutupan lahan pada sempadan sungai, serta pemenuhan layanan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.
5. Integrasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) sudah dilakukan terutama pada kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dengan rata-rata keterlibatan perempuan/rentan di atas 30%.
6. Dukungan dokumen perencanaan, seperti RTnRL, menjadi pedoman penting dalam penentuan lokasi prioritas penanaman, sehingga pelaksanaan rehabilitasi lebih terarah dan efektif. Selain itu, kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH dan penguatan sosialisasi oleh Dinas Kehutanan dan KPH turut mempercepat pencapaian target rehabilitasi.
7. Praktik baik (inovasi) dan penghargaan dalam mendukung peningkatan capaian indikator kinerja juga dapat memotivasi kerja pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.
8. Penguatan tata kelola, pemutakhiran data berbasis spasial, dan pengembangan kegiatan baru yang berbasis sains menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja tersebut.

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEHUTANAN
Alamat : Kol H. Burlian Punti Kayu Km 6.5 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 411476 Fax (0711) 411479. Kode Pos 30125
E-Mail : dishutprovsumsel@yahoo.co.id Website: www.dishutsumsel.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 31 - Januari - 2025

Pihak Kedua, Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,	Pihak Pertama, KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,
ELEN SETIADI, S.H.,M.S.E.	Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19691208 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya	Rp. 77.484.874.860
2.	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu	61 Lokasi
		Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla	12,19%
3.	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman	10 Hektar
		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0,14%
4.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	175 Kelompok
5.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	55.069.890.978	APBD
2.	Pengelolaan Hutan	Rp.	8.260.000.000	APBD
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp.	100.000.000	APBD
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp.	821.000.400	APBD
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp.	50.000.000	APBD

Palembang, 31 Januari 2025

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691208 199603 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEHUTANAN
Alamat : Kol H. Burlian Punti Kayu Km 6.5 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 411476 Fax (0711) 411479. Kode Pos 30125
E-Mail : dishutprovsumsel@yahoo.co.id Website: www.dishutsumsel.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Koimudin, S.H.,M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru.
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua, Gubernur Sumatera Selatan,	Pihak Pertama, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan,
H. Herman Deru	Drs. H. Koimudin, S.H.,M.M. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19691208 199603 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan	Persentase tutupan lahan	Persentase	18,8

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 58.796.152.406,-	APBD
2.	Pengelolaan Hutan	Rp. 10.774.832.000,-	APBD/DBH-DR/DBH-Sawit
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp. 70.200.000,-	APBD
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	RP. 2.549.543.300,-	APBD/DBH-DR
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp. 27.322.600,-	APBD

Palembang, 29 Oktober 2025

Gubernur Sumatera Selatan

H. Herman Deru

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. H. Koimudin, S.H.,M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691208 199603 1 001

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	LANGKAH KERJA	DATA DUKUNG	WAKTU				OUTPUT/HASIL	KETERANGAN (DIISI OLEH APIP)			UNIT PENANGGUNG JAWAB/KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV		BELUM	DALAM PROSES	SELESAI	
1	Hasil pengukuran kinerja digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kinerja	Mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya ke dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berjalan	1) Menginventarisasi hasil pengukuran kinerja (IKU dan IKK) tahun sebelumnya.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun sebelumnya	X				- Dokumen perencanaan kinerja tersusun berbasis hasil pengukuran kinerja				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Subbag PEP
			2) Menganalisis capaian kinerja, permasalahan, dan faktor pendukung/penghambat.	- Hasil evaluasi SAKIP	X				- Target dan indikator kinerja lebih realistis dan terukur				
			3) Menggunakan hasil analisis sebagai dasar penetapan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja.	- Dokumen pengukuran IKU dan IKK	X				- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja				
			4) Menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan hasil evaluasi kinerja.	- Notulen rapat evaluasi kinerja	X								
			5) Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan kinerja (Renstra/Renja/Perjanjian Kinerja).		X								
2	Melakukan Reviu internal atas laporan Kinerja yang telah disusun.	Melaksanakan reviu internal secara sistematis terhadap laporan kinerja sebelum ditetapkan dan disampaikan	1) Membentuk tim reviu internal laporan kinerja.	- Draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	X				- Laporan kinerja telah direviu secara internal				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Subbag PEP
			2) Menyusun jadwal dan pedoman reviu laporan kinerja.	- Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja, PK)	X				- Laporan kinerja lebih akurat, konsisten, dan sesuai pedoman SAKIP				
			3) Melakukan reviu kesesuaian antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.	- Pedoman SAKIP	X				- Tersedianya dokumen hasil reviu internal				
			4) Mengidentifikasi ketidaksesuaian data, indikator, dan narasi kinerja.	- Berita Acara/Rekap hasil reviu internal	X								
			5) Menyampaikan hasil reviu dan rekomendasi perbaikan kepada unit penyusun.		X								
			6) Melakukan perbaikan dan finalisasi laporan kinerja.		X								
3	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi keberhasilan /kegagalan Indicator kinerja dan efisiensi atas pengunaan sumber daya serta menginfokan upayaPeyempurnaan	1. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang komprehensif, analitis, dan berorientasi perbaikan berkelanjutan 2. Menyusun laporan kinerja mempedomani	1. Mengumpulkan data realisasi kinerja dan anggaran dari seluruh bidang/unit kerja	1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	X				Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang memuat analisis capaian kinerja, efisiensi sumber daya, serta rekomendasi perbaikan kinerja				Sekretariat Dinas Kehutanan (Subbagian PEP) bekerja sama dengan seluruh Bidang Teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	LANGKAH KERJA	DATA DUKUNG	WAKTU				OUTPUT/HASIL	KETERANGAN (DIISI OLEH APIP)			UNIT PENANGGUNG JAWAB/KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV		BELUM	DALAM PROSES	SELESAI	
	kinerja ke depan pada masing-masing indicator kinerja	Surat Edaran Gubernur Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2. Membandingkan target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK)	2. Dokumen Renstra dan Renja Dinas Kehutanan	X								
			3. Menganalisis tingkat capaian, keberhasilan/kegagalan, serta efisiensi penggunaan sumber daya	3. Data realisasi indikator kinerja dan anggaran Tahun 2025	X								
			4. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja	4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja	X								
			5. Merumuskan upaya penyempurnaan dan rencana tindak lanjut pada masing-masing indikator kinerja	5. Data pendukung kegiatan/sub kegiatan dari bidang teknis	X								
			6. Menyusun dan memfinalisasi dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025		X								
4	Laporan kinerja agar menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP	Mengintegrasikan seluruh hasil tindak lanjut rekomendasi APIP ke dalam Laporan Kinerja Tahun 2025	1. Menginventarisasi seluruh rekomendasi APIP	Laporan hasil pemeriksaan APIP, matriks tindak lanjut, bukti dukung penyelesaian rekomendasi		X			LKjIP Tahun 2025 yang memuat informasi lengkap tindak lanjut rekomendasi APIP				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Subbag PEP
			2. Mengumpulkan bukti tindak lanjut dari masing-masing unit kerja				X						
			3. Memetakan status tindak lanjut (selesai/proses/belum)				X						
			4. Menyajikan hasil tindak lanjut dalam bab evaluasi LKjIP				X						
5	Dilakukan penilaian berjenjang terhadap penilaian mandiri atas Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (AKIP)	Penerapan mekanisme reviu dan validasi berjenjang atas penilaian mandiri AKIP	1. Melaksanakan penilaian mandiri AKIP oleh perangkat daerah	Dokumen penilaian mandiri AKIP, berita acara reviu, notulen validasi			X		Hasil penilaian mandiri AKIP yang lebih objektif dan akuntabel				Sekretariat Dinas dan Tim SAKIP Dinas Kehutanan
			2. Melakukan reviu internal oleh atasan langsung/tim SAKIP				X						
			3. Melakukan validasi akhir oleh pimpinan perangkat daerah				X						
6	Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.	Penggunaan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar perbaikan kinerja dan pengelolaan sumber daya	1. Mengkaji hasil evaluasi SAKIP internal dan eksternal	Laporan evaluasi SAKIP, rekomendasi APIP				X	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan				Sekretariat Dinas dan seluruh Bidang Teknis
			2. Mengidentifikasi area perbaikan kinerja dan efisiensi					X					
			3. Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan					X					
7	Memanfaatkan informasi dokumen laporan kinerja dalam evaluasi	Integrasi hasil LKjIP dalam proses evaluasi dan perencanaan kinerja	1. Menganalisis capaian kinerja dalam LKjIP	LKjIP Tahun sebelumnya, Renja, hasil evaluasi kinerja				X	Dokumen perencanaan kinerja yang lebih tepat sasaran				Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

No.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	LANGKAH KERJA	DATA DUKUNG	WAKTU				OUTPUT/HASIL	KETERANGAN (DIISI OLEH APIP)			UNIT PENANGGUNG JAWAB/KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV		BELUM	DALAM PROSES	SELESAI	
	pencapaian keberhasilan Kinerja dan penyusunan perencanaan kinerja		2. Mengidentifikasi indikator yang belum optimal					X					
			3. Menjadikan hasil analisis sebagai dasar penyusunan Renja					X					
8	Menyelaraskan antara Target yang ditetapkan di dokumen Renstra 2025-2029 dengan target yang ditetapkan di dalam dokumen IKU 2025	Penyelarasan dan harmonisasi indikator dan target kinerja	1. Mereviu target Renstra dan IKU	Dokumen Renstra 2025–2029, dokumen IKU 2025		X			Keselarasan target strategis dan operasional				Sekretariat Dinas dan Bidang Teknis
			2. Menyesuaikan target IKU agar selaras dengan Renstra			X							
			3. Menetapkan IKU hasil penyelarasan			X							
9	Mengoptimalkan Capaian Realisasi yang ada di Dinas kehutanan	Optimalisasi pemanfaatan capaian kinerja sebagai praktik baik	1. Mengidentifikasi capaian kinerja yang optimal	Data realisasi kinerja, laporan kegiatan		X			Peningkatan capaian indikator kinerja				Seluruh Bidang Teknis
			2. Mendokumentasikan praktik baik (best practice)			X							
			3. Mereplikasi pada unit/kegiatan lain			X							
10	Memberikan pelatihan kepada SDM yang ada untuk mengikuti Pelatihan peyusunan SAKIP	Peningkatan kapasitas SDM di bidang SAKIP	1. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan	Sertifikat pelatihan, modul SAKIP		X			SDM yang kompeten dalam penyusunan dan evaluasi SAKIP				Subbag Umum & Kepegawaian, Subbag Perencanaan
			2. Mengikutsertakan SDM pada pelatihan/bimtek SAKIP			X							
			3. Menerapkan hasil pelatihan					X					
11	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil evaluasi internal	1. Menyusun rencana aksi tindak lanjut	Laporan evaluasi internal, matriks RTL				X	Penyelesaian rekomendasi evaluasi internal				Sekretariat Dinas dan Bidang Terkait
			2. Melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi					X					
			3. Melaporkan hasil tindak lanjut					X					
12	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan	1. Mengkaji hasil evaluasi internal	Laporan evaluasi internal AKIP				X	Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja				Sekretariat Dinas dan Pimpinan Perangkat Daerah
			2. Mengintegrasikan ke perencanaan dan pelaksanaan kinerja					X					
			3. Monitoring perbaikan kinerja					X					